

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN  
ANGGARAN SEBAGAI BENTUK PENGENDALIAN BIAYA  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH**

**SKRIPSI**



**ROSALIA SEPTIASARI  
2022120025**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PRABUMULIH  
2026**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN  
ANGGARAN SEBAGAI BENTUK PENGENDALIAN BIAYA  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (S.E) Pada Program Studi Akuntansi



**ROSALIA SEPTIASARI  
2022120025**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PRABUMULIH  
2026**

## HALAMAN PENGESAHAN

### ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN SEBAGAI BENTUK PENGENDALIAN BIAYA PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

#### SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabumulih.

Oleh :

**Rosalia Septiasari**  
**2022120025**

Prabumulih, 10 Maret 2026

**Pembimbing I**



(Meirani Betriana, S.E., M.Si)  
NUPTK. 0837761662231272

**Pembimbing II**



(Emi Sukmawati, S.E., M.Si)  
NUPTK.2053750651230140

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Akuntansi**  
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabumulih**



(Chairani Adelina, S.E., M.Si)  
NUPTK. 8752770671230342

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Anggaran Sebagai Bentuk Pengendalian Biaya pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih” telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabumulih pada tanggal 17 Juni 2026.

Prabumulih, 17 Juni 2026

Tim Penguji Tugas Akhir

**Ketua:**

Meirani Betriana, S.E., M.Si

NUPTK:0837761662231272

**Anggota:**

1. Emi Sukmawati, S.E., M.Si  
NUPTK: 2053750651230140

2. Chairani Adelina, S.E., M.Si  
NUPTK: 8752770671230342

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Program studi Akuntansi



Dr. Hj. Deslana, S.E., M.M  
NUPTK: 254474064123023

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Chairani Adelina.

Chairani Adelina, S.E., M.Si.  
NUPTK. 8752770671230342

## PERNYATAAN INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rosalia Septiasari

NIM : 2022120025

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa, skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya dan tidak terdapat karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil *plagiasi*, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas perbuatan tersebut.



Prabumulih, 10 Maret 2026  
Yang Membuat Pernyataan



Rosalia Septiasari  
NIM. 2022120025

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”*  
(QS. Al-Baqarah: 286)

*“Keberhasilan bukan milik mereka yang pintar,  
tapi milik mereka yang selalu berusaha dan berdo'a”*  
(B.J. Habibie)

*“Mekarlah di waktu terbaikmu, karena mawar yang indah tidak tumbuh dalam  
semalam, ia tumbuh melalui proses, kesabaran, dan ketangguhan”*  
(Rose.S.S)

**Kupersembahkan karya ini kepada:**

1. Kedua orang tuaku, Bapak Widodo dan Ibu Rina Yuspita.
2. Saudariku Rani Witasari, Desiska Hestisari, dan Dela Yuniasari.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

## **ABSTRAK**

### **Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Anggaran Sebagai Bentuk Pengendalian Biaya pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih**

**Rosalia Septiasari, 2022120025, 2026**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi pertanggungjawaban anggaran sebagai bentuk pengendalian biaya pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Prabumulih telah menerapkan lima syarat/unsur utama dari akuntansi pertanggungjawaban, yang didukung oleh struktur organisasi yang jelas sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2025. Penyusunan anggaran dilakukan secara partisipatif. Klasifikasi kode rekening yang terintegrasi dengan sistem SIPD berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Serta laporan pertanggungjawaban yang diterapkan dengan sangat optimal melalui digitalisasi sistem SIPD dalam bentuk LRA. Namun, terkait penggolongan biaya antara biaya terkendali dan biaya tidak terkendali, instansi ini belum memisahkannya secara spesifik dalam sistem pencatatan dan pelaporannya. Pengendalian biaya pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih telah dilakukan secara optimal dan efektif melalui integrasi aplikasi SIMONEV dan SIPD yang terbukti dapat meningkatkan efisiensi penyerapan anggaran secara signifikan dari 84,56% pada tahun 2023 menjadi 96,26% pada tahun 2024.

**Kata Kunci: Akuntansi Pertanggungjawaban, Anggaran, dan Pengendalian Biaya**

## **ABSTRACT**

### ***Analysis of the Implementation of Budget Accountability Accounting as a Form of Cost Control at the Transportation Agency in Prabumulih City***

***Rosalia Septiasari, 2022120025, 2026***

*This study aims to determine the implementation of budget accountability accounting as a form of cost control at the Prabumulih City Transportation Agency. The type of research used in this study is qualitative research. Data collection techniques in this study were carried out through observation, interviews, documentation, and literature studies. The data obtained from this study were in the form of primary and secondary data. The results of this study indicate that the Prabumulih City Transportation Agency has implemented most of the five main requirements/elements of accountability accounting, which is supported by a clear organizational structure in accordance with Mayoral Regulation Number 41 of 2025. Budget preparation is carried out in a participatory manner. The classification of account codes is integrated with the SIPD system based on Permendagri Number 90 of 2019. As well as accountability reports that are implemented optimally through the digitalization of the SIPD system in the form of LRA. However, regarding the classification of costs between controllable costs and uncontrollable costs, this agency has not yet separated them specifically in its recording and reporting system. Cost control at the Prabumulih City Transportation Agency has been carried out optimally and effectively through the integration of the SIMONEV and SIPD applications, which has been proven to significantly increase budget absorption efficiency from 84.56% in 2023 to 96.26% in 2024.*

***Keywords: Accountability Accounting, Budget, and Cost Control***

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Anggaran Sebagai Bentuk Pengendalian Biaya Pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabumulih.

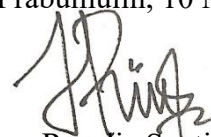
Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Yuniar Pratiwi, S.Si., M.Si., selaku Rektor Universitas Prabumulih.
2. Ibu Dr. Hj. Desliana, S.E., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabumulih.
3. Ibu Chairani Adelina, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabumulih.
4. Ibu Meirani Betriana, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I, dan Ibu Emi Sukmawati, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran untuk mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, doa, serta ilmu baru yang dapat memotivasi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak/Ibu dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terutama dosen Program Studi Akuntansi yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya serta mendidik penulis selama masa perkuliahan dari semester awal hingga semester akhir. Terima kasih atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan.
6. Bapak Arlus selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Prabumulih yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. Ibu Yustia Ningrum, Bapak Jamri Murdani, Ibu Nia Sastiana dan staf lainnya yang telah membantu proses penelitian pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih.

7. Teruntuk Bapak Widodo dan Ibu Rina Yuspita, sosok orang tua hebat yang selalu berjuang dan selalu mendoakan kebaikan anak-anaknya. Terima kasih atas untaian doa yang tiada putus, limpahan kasih sayang, serta motivasi yang menjadi kekuatan utama bagi penulis untuk menggapai cita-cita.
8. Ayundaku tersayang, Rani Witasari, Desiska Hestisari, dan Dela Yuniasari, terima kasih telah menjadi sandaran dan sumber kekuatan bagi adik bungsu kalian ini. Terima kasih atas doa yang tulus, semangat yang tiada henti, serta dukungan luar biasa yang kalian berikan.
9. Kepada Joe Abi Prayoga yang sudah menjadi bagian dari perjalanan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas kesabaran dan dukungan yang luar biasa, mulai dari awal masa perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Semoga kesuksesan dan doa-doa baik selalu menyertai kita.
10. Kepada sahabat sekaligus saudaraku, Aura Rizky Marita (Maris). Terima kasih untuk semua cerita, tawa, dan tangis yang telah kita lewati bersama. Kamu bukan hanya sekadar sahabat, tetapi sudah kuanggap sebagai bagian dari keluargaku. Semoga kita selalu saling mendukung dan tetap bersama dalam keadaan apa pun.
11. Kepada almamater dan teman-teman seperjuangan Prodi Akuntansi Angkatan 2022 yang telah berjuang bersama dalam menempuh pendidikan.
12. Terakhir, untuk diri sendiri, Rosalia Septiasari alias Ocha yang pantang menyerah dalam mengejar mimpi, terima kasih telah menjadi kuat di hari-hari yang sulit dan tetap berjalan meski langkah terasa berat. Teruslah tumbuh dan mekarlah seperti bunga mawar yang indah seperti namamu, menebar harum dan keindahan di setiap langkahmu.

Akhir kata, penulis menyadari tanpa ridho dan pertolongan dari Allah SWT, serta bantuan, dukungan, dan motivasi dari segala pihak, skripsi ini tidak dapat diselesaikan. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan ini, penulis ucapkan terimakasih banyak semoga kebaikan senantiasa terlimpah kepada kita semua, Aamiin Yarabbal'amin.

Prabumulih, 10 Maret 2026



Rosalia Septiasari  
NIM. 2022120025

## DAFTAR ISI

### COVER

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                       | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....                      | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN INTEGRITAS</b> .....                    | <b>iv</b>   |
| <b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....                     | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                  | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRACT</b> .....                                 | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                           | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                               | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                             | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                            | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                          | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....                         | <b>xvi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                        | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang .....                              | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                             | 4           |
| 1.3 Batasan Penelitian .....                          | 4           |
| 1.4 Tujuan Penelitian .....                           | 4           |
| 1.5 Manfaat Penelitian .....                          | 4           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                  | <b>6</b>    |
| 2.1 Landasan Teori.....                               | 6           |
| 2.1.1 Akuntansi Pertanggungjawaban .....              | 6           |
| 1. Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban .....      | 6           |
| 2. Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban.....          | 7           |
| 3. Syarat - Syarat Akuntansi Pertanggungjawaban ..... | 8           |
| 4. Pusat - Pusat Pertanggungjawaban.....              | 10          |
| 2.1.2 Anggaran .....                                  | 11          |
| 1. Pengertian Anggaran .....                          | 11          |
| 2. Fungsi Anggaran .....                              | 12          |
| 3. Jenis - Jenis Anggaran.....                        | 13          |

|                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4. Karakteristik Dan Kategori Anggaran.....                                                  | 13        |
| 2.1.3 Pengendalian Biaya .....                                                               | 14        |
| 1. Pengertian Pengendalian Biaya .....                                                       | 14        |
| 2. Tujuan Pengendalian Biaya.....                                                            | 15        |
| 3. Komponen Pengendalian Biaya .....                                                         | 15        |
| 2.2 Penelitian Terdahulu .....                                                               | 16        |
| 2.3 Kerangka Pemikiran.....                                                                  | 18        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                                       | <b>20</b> |
| 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....                                                        | 20        |
| 3.2 Jenis Penelitian.....                                                                    | 20        |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data.....                                                               | 21        |
| 3.3.1 Jenis Data .....                                                                       | 21        |
| 3.3.2 Sumber Data.....                                                                       | 21        |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data.....                                                             | 22        |
| 3.5 Populasi Dan Sampel .....                                                                | 23        |
| 3.5.1 Populasi.....                                                                          | 23        |
| 3.5.2 Sampel.....                                                                            | 23        |
| 3.5.3 Teknik Sampling .....                                                                  | 24        |
| 3.6 Metode Analisis .....                                                                    | 25        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                                           | <b>27</b> |
| 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....                                                     | 27        |
| 4.1.1 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Prabumulih.....                                 | 27        |
| 4.1.2 Visi Dan Misi Dinas Perhubungan Kota Prabumulih .....                                  | 27        |
| 4.1.3 Nilai Organisasi Dinas Perhubungan Kota Prabumulih .....                               | 28        |
| 4.1.4 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Prabumulih.....                             | 28        |
| 4.1.5 Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Prabumulih.....                                | 30        |
| 4.2 Hasil Penelitian .....                                                                   | 36        |
| 4.2.1 Syarat-Syarat Akuntansi Pertanggungjawaban .....                                       | 36        |
| 4.2.2 Pusat Pertanggungjawaban.....                                                          | 48        |
| 4.3 Pembahasan Hasil Penelitian .....                                                        | 50        |
| 4.3.1 Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Pada Dinas Perhubungan<br>Kota Prabumulih ..... | 50        |

|                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.3.2 Peran Dan Evaluasi Anggaran Sebagai Bnetuk Pengendalian Biaya<br>Pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih ..... | 54        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                          | <b>56</b> |
| 5.1 Kesimpulan .....                                                                                                | 56        |
| 5.2 Saran.....                                                                                                      | 56        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                         | <b>58</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                                                                               | <b>60</b> |



## DAFTAR TABEL

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 Realisasi Dan Anggaran Belanja.....                                                      | 3  |
| Tabel 4.1 Laporan Pertanggungjawaban Perprogram Kegiatan Dinas<br>Perhubungan Kota Prabumulih..... | 44 |



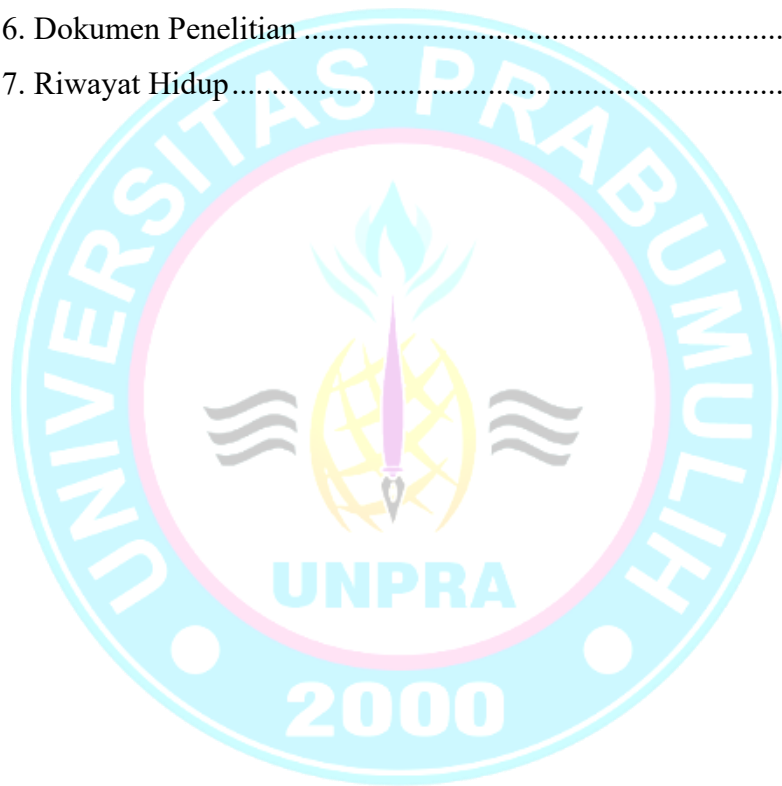
## DAFTAR GAMBAR

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....                                   | 19 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Prabumulih..... | 29 |



## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1. Kartu Bimbingan .....                                                      | 60 |
| Lampiran 2. Surat Izin Penelitian.....                                                 | 64 |
| Lampiran 3. Transkrip Wawancara .....                                                  | 66 |
| Lampiran 4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Perhubungan Kota<br>Prabumulih..... | 76 |
| Lampiran 5. Laporan Pertanggungjawaban perprogram kerja .....                          | 78 |
| Lampiran 6. Dokumen Penelitian .....                                                   | 81 |
| Lampiran 7. Riwayat Hidup.....                                                         | 83 |



## DAFTAR SINGKATAN



|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| APBD       | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah            |
| BKU        | : Buku Kas Umum                                     |
| DISKOMINFO | : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi        |
| DPA        | : Dokumen Pelaksana Anggaran                        |
| LLAJ       | : Lalu Lintas dan Angkutan Jalan                    |
| LRA        | : Laporan Realisasi Anggaran                        |
| OPD        | : Organisasi Perangkat Daerah                       |
| PERWAKO    | : Peraturan Wali Kota Prabumulih                    |
| RKPD       | : Rencana Kerja Perangkat Daerah                    |
| RKUD       | : Rekening Kas Umum Daerah                          |
| SIMDA      | : Sistem Informasi Manajemen Daerah                 |
| SIMONEV    | : Sistem Monitoring Dan Evaluasi                    |
| SIPD       | : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah              |
| SK PPTK    | : Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan |
| SPJ        | : Surat Pertanggungjawaban                          |
| UPTD       | : Unit Pelaksana Teknis Dinas                       |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Era globalisasi yang semakin kompetitif, pengelolaan keuangan negara khususnya pada instansi pemerintah daerah, menuntut adanya penerapan sistem akuntansi yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan keuangan negara dalam menjalankan aktivitasnya juga tidak lepas dari segala bentuk pengendalian, khususnya pada instansi pemerintah daerah. Pengendalian yang baik dapat membantu pimpinan dalam mengatasi masalah operasional, Tanpa adanya mekanisme pengendalian yang kuat, proses pengelolaan anggaran rentan menimbulkan kesalahan atau pemborosan yang dapat merugikan instansi.

Sejalan dengan hal tersebut, akuntansi pertanggungjawaban anggaran menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem akuntansi pemerintahan yang digunakan untuk menilai kinerja anggaran serta memastikan bahwa penggunaan dana publik telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu cabang dari ilmu akuntansi manajemen yang dikaitkan serta disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban yang ada dalam suatu organisasi atau instansi. Istilah akuntansi pertanggungjawaban ini akan mengarah pada proses akuntansi yang melaporkan bagaimana kinerja pimpinan pusat pertanggungjawaban dalam mengelola pekerjaan yang langsung berada di bawah pengawasannya (Narsa, 2023).

Sistem akuntansi pertanggungjawaban ini digunakan untuk mencatat, mengawasi, dan melaporkan realisasi anggaran berdasarkan tanggung jawab setiap unit organisasi atau instansi. Fungsi utama dari sistem ini untuk menilai kinerja anggaran yang telah dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, pengendalian biaya melalui sistem akuntansi pertanggungjawaban menjadi elemen penting untuk menjaga keterbukaan, tanggung jawab, dan penggunaan dana negara yang lebih baik, serta dapat mengatasi masalah penyimpangan dana anggaran dan praktik korupsi.

Dalam akuntansi pertanggungjawaban, anggaran harus disusun berdasarkan pusat-pusat pertanggungjawaban agar setiap manajer memiliki target dan tanggung jawab yang jelas. Anggaran juga berfungsi sebagai standar tolak ukur untuk menilai kinerja hasil yang dicapai oleh manajer pusat pertanggungjawaban dengan standar yang telah ditetapkan. Pusat pertanggungjawaban dalam akuntansi pertanggungjawaban terdiri dari empat pusat, yaitu pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Untuk menilai apakah akuntansi pertanggungjawaban telah diterapkan dengan baik pada suatu instansi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu struktur organisasi, anggaran, penggolongan biaya, pengklasifikasian kode rekening, dan pelaporan pertanggungjawaban (Kholmi, 2019).

Bentuk pertanggungjawaban anggaran di Indonesia sebagaimana telah ditetapkan dalam berbagai regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Regulasi ini mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun laporan realisasi anggaran yang tepat, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, terlepas dari kerangka regulasi hukum yang kuat ini, masih ditemukan banyak instansi yang mengalami ketidaksesuaian dalam pelaporan anggaran.

Ketidaksesuaian pelaporan masih menjadi salah satu isu signifikan dalam tata kelola pemerintah daerah. Isu ini diperkuat oleh adanya temuan dari data Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I 2023 yang menemukan 542 pemerintah daerah yang mengalami ketidaksesuaian pelaporan, terutama pada selisih pengeluaran yang melebihi 10% dari target yang telah ditetapkan. Kondisi ini disebabkan oleh minimnya pengguna sistem berbasis digital dan rendahnya kompetensi sumber daya manusia, khususnya di sektor infrastruktur serta layanan masyarakat (*bpk.go.id/lhps*, 2023).

Dinas Perhubungan Kota Prabumulih yang beralamat di Jl. Lingkar Timur Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Gedung Terminal Kota Prabumulih merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD). Dana tersebut digunakan untuk membiayai program dan kegiatan di sektor transportasi dan infrastruktur perhubungan. Besarnya tanggung jawab tersebut menegaskan posisi strategis Dinas Perhubungan dalam mendukung keseluruhan pembangunan di Kota Prabumulih, khususnya dalam menjamin kelancaran sistem transportasi daerah. Mengingat Kota Prabumulih sebagai jalur penghubung transportasi perdagangan minyak dan gas di wilayah Sumatera Selatan.

**Tabel 1.1 Realisasi Dan Anggaran Belanja**

| <b>Tahun</b> | <b>Anggaran Belanja</b> | <b>Realisasi</b> | <b>%</b> |
|--------------|-------------------------|------------------|----------|
| 2023         | 7.713.900.395           | 6.523.155.961    | 84,56    |
| 2024         | 7.067.732.000           | 6.803.575.547    | 96,26    |

*Sumber : LRA Dinas Perhubungan Kota Prabumulih 2023-2024*

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran Dinas Perhubungan Kota Prabumulih pada tahun 2023 mencapai sebesar Rp.6.523.155.961 atau sekitar 84,56% dari total anggaran Rp.7.713.900.395. Pada tahun 2024, realisasi anggaran menjadi Rp.6.803.575.547 atau sekitar 96,26% dari total anggaran sebesar Rp.7.067.732.000. Dari data tersebut terlihat adanya peningkatan persentase realisasi anggaran, walaupun total anggaran pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp.646.168.395, tetapi kinerja penyerapan anggaran meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Prabumulih sudah lebih baik dari tahun sebelumnya dalam pengelolaan dan penyerapan anggaran yang bersumber dari APBD.

Situasi ini secara jelas menunjukkan adanya peningkatan perbaikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program kegiatan yang dilaksanakan, khususnya di sektor transportasi dan infrastruktur perhubungan. Pencapaian ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor serta praktik pertanggungjawaban seperti apa yang telah diterapkan oleh instansi terkait dalam pengelolaan anggaran dan pengendalian biaya, sehingga dapat mencapai peningkatan kinerja yang signifikan di tahun 2024. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Anggaran Sebagai Bentuk Pengendalian Biaya Pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban anggaran sebagai bentuk pengendalian biaya pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih?

## **1.3 Batasan Penelitian**

Batasan penelitian yang dilakukan, berfokus pada analisis penerapan akuntansi pertanggungjawaban anggaran sebagai bentuk pengendalian biaya pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih. Dilihat dari pusat-pusat pertanggungjawaban serta syarat-syarat/unsur penting dari akuntansi pertanggungjawaban.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan akuntansi pertanggungjawaban anggaran sebagai bentuk pengendalian biaya Pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dibidang akuntansi, khususnya terkait dengan akuntansi pertanggung jawaban yang merupakan salah satu cabang dari ilmu akuntansi manajemen.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Instansi**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam membuat kebijakan terutama dalam pengelolaan anggaran dan pengendalian biaya melalui pusat-pusat pertanggungjawaban agar lebih baik. Sehingga dapat mengurangi selisih realisasi anggaran dan dapat meningkatkan efisiensi proyek infrastruktur yang lebih baik bagi masyarakat sekitar.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan keberhasilan, terutama jika hasilnya sangat berkontribusi pada perbaikan tata kelola pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melanjutkan penelitian dalam konteks yang serupa atau mengembangkan aspek-aspek lain dari penggunaan akuntansi pertanggung jawaban.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Akuntansi Pertanggungjawaban**

###### **1. Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban**

Akuntansi pertanggungjawaban muncul dari adanya pendelegasian wewenang. Pendelegasian ini terjadi ketika atasan memberikan tanggung jawab kepada bawahan untuk menjalankan tugas tertentu. Informasi akuntansi pertanggungjawaban ini berhubungan dengan wewenang yang dimiliki oleh tiap-tiap manajer, wewenang didelegasikan dari manajer tingkat atas ke manajer tingkat bawah (Desentralisasi) dan pendelegasian wewenang ini menuntut manajer tingkat bawah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang terhadap manajer tingkat atas. Melalui akuntansi pertanggungjawaban pimpinan dapat mengendalikan tanggung jawab kepada setiap unit kerja dari setiap pusat pertanggungjawaban yang ada di bawahnya (Betriana *et al*, 2022).

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu cabang dari ilmu akuntansi manajemen dan sistem akuntansi yang dikaitkan serta disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban yang ada dalam suatu organisasi atau instansi. Dengan adanya akuntansi pertanggung jawaban ini diharapkan dapat membantu manajer dalam pengalokasian biaya perusahaan agar lebih teranggarkan dan sistem akuntansi yang dibagi dalam pusat pertanggungjawaban akan lebih memudahkan dalam pengontrolan. Sehingga manajer dapat menilai kinerja dari setiap pusat-pusat pertanggungjawabannya agar permasalahan yang terjadi dapat segera teratasi (Betriana *et al*, 2022).

Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja yang dicapai oleh pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi atau instansi, guna untuk mengukur prestasi dan menilai tanggungjawab pimpinan terhadap penyimpangan biaya atau penghasilan yang dianggarkan (Kholmi, 2019). Akuntansi pertanggung jawaban ini akan merujuk pada proses akuntansi yang menyajikan laporan mengenai penilaian kinerja pimpinan terhadap

pusat pertanggungjawaban dalam mengelola pekerjaan yang berada dibawah pengawasannya. Oleh karena itu, Akuntansi Pertanggungjawaban berfokus pada pengukuran realisasi kinerja dengan rencana yang telah ditetapkan oleh setiap pusat pertanggungjawaban (Narsa, 2023).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban adalah cabang dari ilmu akuntansi manajemen dan sistem akuntansi yang dirancang berdasarkan pendelegasian wewenang dari atasan ke bawahan. Sistem ini berguna untuk mengukur, mengevaluasi, serta melaporkan kinerja setiap pusat pertanggung jawaban dalam suatu organisasi atau isntansi. Tujuan utamanya adalah menilai prestasi dan pertanggungjawaban manajer dalam mengendalikan biaya dan pendapatan, dengan mengukur hasil realisasi terhadap anggaran yang telah ditetapkan, sehingga permasalahan yang terjadi dapat segera teratasi.

## **2. Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban**

Akuntansi pertanggungjawaban dalam organisasi yang terdesentralisasi dapat bermanfaat dan memberi informasi penting dalam pengelolaan organisasi. Adapun manfaat dari akuntansi pertanggungjawaban (Narsa, 2023) sebagai berikut:

### **a. Sebagai dasar penyusunan anggaran**

Anggaran merupakan rencana dalam bentuk uang. Dalam proses penyusunan anggaran, pasti sudah ditetapkan siapa yang bertanggungjawab dan berapa sumber daya yang harus dialokasikan untuk melaksanakan aktivitas tertentu. Sumber daya yang digunakan memungkinkan pimpinan berkontribusi dalam usaha pencapaian organisasi yang diukur dengan satuan moneter standar yang berupa informasi akuntansi.

### **b. Penilaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban**

Akuntansi pertanggungjawaban bermanfaat sebagai alat penting dalam perencanaan dan pengendalian karena menghubungkan data keuangan dengan manajer yang bertanggung jawab atas perencanaan dan realisasi kinerja. Sistem ini memungkinkan pengendalian dilakukan melalui keterlibatan manajer dalam menganggarkan pendapatan atau biaya dari setiap unit kerja perprogram. Dengan menyajikan laporan realisasi pendapatan dan biaya yang terperinci dari setiap perprogram kegiatan, informasi ini bermanfaat sebagai tolak ukur yang

mencerminkan efektivitas manajer dalam menggunakan sumber daya untuk mencapai sasaran organisasi.

c. Pemotivasi manajer

Akuntansi pertanggungjawaban memberikan informasi mengenai capaian realisasi rencana dan menjadikannya ukuran keberhasilan kinerja manajer. Informasi ini berfungsi sebagai pemotivasi karena secara langsung memengaruhi keyakinan manajer terhadap struktur penghargaan. Ketika prestasi manajer sudah mencapai tujuan, maka manajer akan mendapat kepuasan tersendiri dan hasilnya juga akan diakui dan diberi penghargaan.

### **3. Syarat – Syarat Akuntansi Pertanggungjawaban**

Untuk dapat menerapkan akuntansi pertanggung jawaban, terdapat syarat-syarat/unsur yang menjadi landasan utama dan harus dipenuhi dalam organisasi atau instansi (Kholmi, 2019) sebagai berikut:

a. Struktur organisasi

Struktur organisasi harus dirancang menggambarkan aliran tanggung jawab dan wewenang yang jelas di setiap tingkatan dalam suatu unit kerja. Struktur yang baik, didukung oleh pembagian tugas yang jelas, sehingga setiap individu dalam organisasi mengetahui batasan-batasan wewenang dan tanggung jawabnya. Wewenang mengalir dari manajemen atas ke bawah, sedangkan tanggung jawab mengalir sebaliknya, dari bawahan ke atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wewenang yang didelegasikan. Dengan demikian, kejelasan struktur ini adalah syarat utama agar sistem akuntansi pertanggung jawaban dapat berfungsi efektif sebagai alat serta bentuk pengendalian dan pengukuran kinerja.

b. Anggaran

Setiap pusat pertanggungjawaban harus berpartisipasi dalam penyusunan anggaran, karena anggaran merupakan gambaran rencana kerja para manajer yang akan dilaksanakan dan sebagian besar dalam penilaian kerjanya. Untuk itu dalam penyusunan anggaran dibutuhkan peran seorang pimpinan dalam setiap unit kerja, karena kegiatan penganggaran sangat diperlukan oleh perusahaan atau organisasi agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Anggaran disusun

bukan untuk membatasi pengeluaran, melainkan sebagai informasi data untuk menggunakan sumber daya perusahaan agar lebih baik. Oleh sebab itu, koordinasi antar pusat pertanggungjawaban menjadi kunci agar anggaran dapat berfungsi optimal sebagai alat perencanaan dan pengendalian.

c. Penggolongan biaya (biaya terkendali dan tidak terkendali)

Dalam akuntansi pertanggungjawaban, setiap pimpinan harus berpartisipasi dalam menyusun anggaran dari masing-masing bagian, biaya harus dipisahkan menjadi biaya terkendali dan biaya tak-terkendali. Oleh karena itu, masing-masing akan diminta pertanggungjawaban mengenai anggaran dan realisasinya. karena tidak semua biaya yang terjadi dalam suatu bagian unit kerja dapat dikendalikan oleh pimpinan. Biaya terkendali adalah biaya yang dapat dipengaruhi langsung oleh pimpinan dalam jangka waktu tertentu. Biaya tak-terkendali adalah biaya yang tidak dapat dipengaruhi atau dikendalikan langsung oleh pimpinan pada periode tertentu.

d. Pengklasifikasian kode rekening

Akuntansi pertanggungjawaban memerlukan susunan kode rekening yang jelas dalam suatu organisasi. Setiap biaya yang terjadi harus diberi kode rekening yang berbeda-beda agar tidak tertukar sehingga dapat mempermudah pengawasan. Setiap tingkatan manajer berfungsi sebagai pusat biaya dan dibebani dengan biaya yang terjadi di dalamnya. Kode rekening ini sangat penting untuk mengklasifikasikan semua akun, sehingga biaya-biaya yang terjadi mudah untuk dipertanggungjawabkan.

e. Laporan pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban dibuat setiap bulan oleh bagian akuntansi berdasarkan rekapitulasi biaya. Atas dasar rekapitulasi biaya disajikan laporan pertanggungjawaban biaya maka isi dari laporan pertanggungjawaban disesuaikan dengan tingkatan manajemen yang akan menerimanya. Laporan ini berfungsi sebagai umpan balik atas wewenang yang didelegasikan, yang disampaikan dari manajemen tingkat bawah ke tingkat atas. Manajer tingkat bawah menerima rincian jenis-jenis biaya yang detail. Sementara itu, manajer tingkat atas menerima ringkasan yang mencakup total biaya dari pusat-pusat biaya di bawahnya.

#### 4. Pusat - Pusat Pertanggungjawaban

Setiap pimpinan harus memahami tanggungjawabnya dengan jelas. Oleh sebab itu, organisasi harus memiliki bagan organisasi sebagaimana dipersyaratkan dalam unsur akuntansi pertanggungjawaban yang harus dipenuhi, guna untuk menggambarkan secara jelas batasan-batasan tanggungjawab dan pelaporan. Tanggung jawab pimpinan harus dijelaskan secara lengkap dalam deskripsi tertulis. Atas dasar itulah perusahaan atau organisasi perlu memiliki yang namanya pusat pertanggungjawaban (Nursanty *et al*, 2022).

Pusat pertanggungjawaban yaitu unit yang dipimpin oleh menejer yang bertanggungjawab terhadap aktivitas dari pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban pada dasarnya diciptakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menjadi alat untuk mengendalikan organisasi jika struktur organisasi yang melandasinya sudah disusun secara rasional (Santoso *et al*, 2023). Pusat pertanggungjawaban diklasifikasikan berdasarkan sifat masukan yang diukur dalam bentuk biaya, dan keluaran yang diukur dalam bentuk pendapatan, atau didasarkan dalam bentuk biaya dan pendapatan secara bersama-sama. Oleh karena itu, terdapat empat tipe utama pusat pertanggung jawaban (Kholmi, 2019) yaitu:

##### a. Pusat biaya

Pusat biaya adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh seorang manajer dengan kewenangan dan tanggung jawab kinerjanya diukur berdasarkan nilai masukan dalam bentuk biaya. Dalam hal ini, manajer harus bertanggung jawab penuh dalam mengendalikan biaya yang terjadi dan tidak bertanggung jawab untuk laba, pendapatan, maupun investasi. Penilaian kinerja manajer hanya berfokus pada pengelolaan sumber daya biaya yang terjadi dalam organisasi.

##### b. Pusat pendapatan

Pusat pendapatan adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh seorang manajer dengan kewenangan dan tanggungjawab kinerjanya diukur berdasarkan nilai keluaran dalam bentuk pendapatan tanpa memperhitungkan masukan berupa biaya. Manajer tidak memiliki wewenang atas biaya yang terjadi di luar lingkup pendapatan. Pusat pendapatan tidak dapat disebut sebagai pusat laba karena pusat pendapatan hanya fokus pada pendapatan, bukan pada biaya, sehingga tidak bisa disamakan dengan pusat laba.

c. Pusat laba

Pusat laba adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh seorang manajer dengan kewenangan serta kinerjanya diukur dari selisih pendapatan dan biaya dalam pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Pusat laba umumnya terdapat pada organisasi yang dibagi-bagi berdasarkan divisi-divisi penghasilan laba. Dalam akuntansi pertanggungjawaban, setiap pusat laba diberikan tanggungjawab untuk menghasilkan laba atau keuntungan tertentu.

d. Pusat investasi

Pusat investasi adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh seorang manajer dengan kewenangan mengendalikan pendapatan, biaya, laba serta memperhitungkan jumlah sumber dana yang diinvestasikan dalam harta yang digunakan oleh pusat pertanggungjawaban tersebut. Pusat investasi dapat berupa divisi, departemen atau proyek yang mengharapkan imbal hasil investasi atau laba dari aset yang diinvestasikan. Ukuran prestasi manajer pusat investasi dapat diukur dengan *Return On Investments* (ROI) guna untuk memperoleh hasil atas investasi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Pertanggungjawaban merupakan suatu unit yang dipimpin oleh manajer yang bertanggungjawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang mengharuskan setiap pimpinan harus memahami dan menjalankan tugasnya sesuai batasan yang jelas dilihat dari bagan organisasi. Pusat pertanggungjawaban ini diciptakan sebagai alat utama untuk mencapai tujuan organisasi sekaligus berfungsi sebagai mekanisme pengendalian. Pusat pertanggungjawaban terbagi menjadi empat tipe yaitu, pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi.

## 2.1.2 Anggaran

### 1. Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan suatu perencanaan keuangan perusahaan untuk masa yang akan datang, sekaligus berperan sebagai alat pengendalian. Anggaran menunjukkan suatu perencanaan rinci yang menunjukkan bagaimana pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk dipakai selama periode tertentu di masa depan (Narsa, 2023). Anggaran merupakan suatu rencana tertulis dari keseluruhan aktivitas organisasi yang dinyatakan dalam satuan angka pada periode tertentu

yang dibuat dengan sistematis dan formal. Anggaran diperlukan karena organisasi sering menghadapi ketidakpastian pada masa yang akan datang sehingga dengan budget atau anggaran akan mengarahkan untuk mencapai tujuan sasaran yang ditetapkan organisasi (Kholmi, 2019).

Anggaran merupakan salah satu alat yang digunakan sebagai perencanaan dan pengendalian semua kegiatan organisasi yang dinyatakan dalam satuan uang, yang mencakup pengembangan strategi jangka pendek maupun jangka panjang, hingga pengembangan prosedur tindak lanjut (Betriana *et al*, 2022). Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah rencana keuangan tertulis untuk masa depan organisasi. Fungsinya sebagai perencanaan dari sumber daya yang akan dialokasikan, serta berfungsi sebagai alat pengendalian untuk memastikan semua kegiatan yang diukur dalam satuan uang berjalan sesuai tujuan. Anggaran penting untuk membantu organisasi dalam menghadapi ketidakpastian dan mengarahkan seluruh aktivitas agar sasaran dapat tercapai secara sistematis.

## 2. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran dalam organisasi (Purwanti, 2023) yaitu sebagai berikut:

### a. Anggaran sebagai alat perencanaan

Anggaran membantu organisasi dalam merencanakan kegiatan operasional dan keuangan dimasa depan. Dengan mengidentifikasi tujuan dan sasaran organisasi, serta mengalokasikan sumber daya yang sesuai. Anggaran akan membantu dalam menetapkan prioritas, merumuskan rencana strategis, dan memperkirakan hasil yang diharapkan.

### b. Anggaran sebagai alat pengendalian

Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan organisasi memantau penggunaan dana dan sumber daya lainnya. Dengan membandingkan anggaran dengan kinerja aktual, organisasi dapat mengidentifikasi penyimpangan atau varians yang mungkin terjadi.

### c. Anggaran sebagai alat koordinasi

Anggaran membantu dalam mengoordinasikan kegiatan berbagai departemen atau divisi dalam organisasi. Dengan menyatukan tujuan dan sasaran di dalam anggaran, organisasi dapat memastikan bahwa setiap bagian organisasi

bekerja secara sejalan, menghindari tumpang tindih atau konflik dalam alokasi sumber daya.

### 3. Jenis-Jenis Anggaran

Berdasarkan pusat-pusat pertanggungjawaban, anggaran terbagi menjadi lima jenis (Arianti, 2025), yaitu sebagai berikut:

- a. Anggaran induk adalah sebuah rencana keuangan komprehensif selama satu tahun yang terdiri atas anggaran berbagai departemen dan aktivitas. Anggaran induk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan.
- b. Anggaran operasional terdiri atas anggaran aktivitas yang dilakukan organisasi dalam rangka memperoleh keuntungan seperti, penjualan, produksi dan lainnya. Hasil anggaran operasional ini adalah laporan laba rugi yang disusun berdasarkan data estimasi.
- c. Anggaran keuangan  
Anggaran keuangan meliputi anggaran arus kas masuk, arus kas keluar dan posisi keuangan. Rencana arus kas masuk dan keluar diperinci dalam anggaran kas. Posisi keuangan disajikan dalam bentuk laporan posisi keuangan.
- d. Anggaran berkelanjutan  
Dalam anggaran berkelanjutan setelah anggaran satu bulan direalisasikan, anggaran satu bulan di masa datang ditambahkan sehingga organisasi selalu memiliki anggaran dengan cakupan dua belas bulan. Anggaran berkelanjutan menuntut pimpinan untuk selalu melakukan perencanaan dimuka.
- e. Anggaran yang selalu diperbarui  
Anggaran ini bukan bertujuan agar organisasi memiliki anggaran dua belas bulan, melainkan untuk memperbarui anggaran induk setiap bulan saat ada informasi baru.

### 4. Karakteristik dan Kategori Anggaran

Agar dapat menjalankan perannya secara optimal dalam perusahaan, setiap anggaran harus disusun dengan cermat dan memenuhi kriteria tertentu. Adapun

karakteristik anggaran yang baik dalam organisasi (Rahmadani, 2024) yaitu sebagai berikut:

- a. Anggaran disusun berdasarkan program kegiatan guna memastikan alokasi dana dilakukan sesuai dengan aktivitas operasional.
- b. Anggaran disusun berdasarkan pusat pertanggungjawaban sehingga mempermudah akuntabilitas dan evaluasi kinerja.
- c. Anggaran mampu menciptakan keselarasan tujuan antara tujuan individu dengan tujuan organisasi.
- d. Anggaran juga harus mampu berfungsi sebagai perencanaan dan berfungsi sebagai alat serta bentuk pengendalian.

Adapun hasil penjumlahan nilai kinerja anggaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri keuangan pasal 249 ayat (7) dapat dikelompokkan kedalam kategori sebagai berikut:

- a. Nilai kinerja anggaran  $> 90$  dikategorikan dengan sangat baik.
- b. Nilai kinerja anggaran  $> 80 - 90$  dikategorikan dengan baik.
- c. Nilai kinerja anggaran  $> 60 - 80$  dikategorikan dengan cukup.
- d. Nilai kinerja anggaran  $> 50 - 60$  dikategorikan dengan kurang.
- e. Nilai kinerja anggaran sampai dengan 50 dikategorikan dengan sangat kurang.

### 2.1.3 Pengendalian Biaya

#### 1. Pengertian Pengendalian Biaya

Pengendalian adalah proses penetapan standar, memperoleh umpan balik mengenai kinerja, dan melakukan koreksi apabila kinerja menyimpang dari rencana (Arianti, 2025). Pengendalian adalah elemen penting dalam manajemen yang memastikan kegiatan dan hasil organisasi sesuai dengan rencana yang ditetapkan (Prakoso, 2024). Biaya merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh organisasi atau perorangan untuk memproduksi barang atau jasa untuk menjalankan oprasional organisasi (Abdi *et al*, 2024). Biaya adalah nilai kas atau setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan sehingga memberi manfaat bagi organisasi di masa yang akan datang (Betriana *et al*, 2022).

Pengendalian biaya adalah usaha untuk mencapai target biya dalam kegiatan tertentu. Metode yang dapat digunakan untuk mengendalikan biaya

seperti program pengurangan biaya, dan perhatian keberlanjutan terhadap keputusan terkait biaya serta pengeluaran (Prakoso, 2024). Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian biaya adalah proses yang sistematis di mana organisasi menetapkan dan membandingkan kinerja biaya dengan standar pengeluaran, serta melakukan tindakan koreksi apabila terjadi penyimpangan. Tujuannya untuk memastikan seluruh sumber biaya yang dikeluarkan sesuai dengan rencana sehingga dapat memberikan manfaat yang diharapkan bagi kelangsungan operasional dan pencapaian tujuan organisasi.

## 2. Tujuan Pengendalian Biaya

Dalam pengendalian biaya terdapat beberapa cara yang digunakan dalam mencapai tujuan penngendalian biaya (Prakoso, 2024) yaitu sebagai berikut:

### a. Memanfaatkan akuntansi pertanggungjawaban

Akuntansi pertanggungjawaban berfungsi untuk memastikan bahwa setiap organisasi bertanggungjawab atas biaya yang dikeluarkan. Sistem ini mencatat serta melaporkan pengeluaran berdasarkan tanggungjawab setiap unit kerja.

### b. Indentifikasi biaya

Mengidentifikasi biaya dari berbagai aktivitas yang memungkinkan perusahaan untuk memahami pengeluaran secara lebih mendetail. Dengan membandingkan biaya aktivitas yang berbeda, perusahaan dapat mengetahui sumber biaya dan perbedaan antar departemen.

### c. Menggunakan biaya standar yang ditetapkan sebelumnya serta menyusun anggaran biaya

Dengan menetapkan biaya standar dan menyusun anggaran, organisasi dapat membandingkan biaya aktual dengan anggaran tersebut. Sistem ini memfasilitasi pengelolaan biaya dengan lebih efektif dan terencana.

## 3. Komponen Pengendalian Biaya

Terdapat komponen yang perlu diperhatikan dalam pengendalian biaya (Prakoso, 2024) yaitu sebagai berikut:

### a. Anggaran

Anggaran merupakan representasi kuantitatif dari sebuah rencana yang

dinyatakan dalam bentuk fisik, keuangan atau kombinasi keduanya. Dalam konteks pengendalian biaya anggaran memiliki peran penting dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

b. Biaya standar

Biaya standar dapat diterapkan dalam perhitungan biaya, baik untuk proses produksi maupun untuk biaya pesanan. Karena pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk memantau pengeluaran dan mengevaluasi kinerja nyata dibandingkan dengan anggaran yang telah ditentukan.

c. Analisis varians

Varians adalah selisih antara biaya aktual dengan biaya standar yang ditetapkan sebelum kegiatan operasi perusahaan dimulai. Total varians mengukur perbedaan antara biaya standar untuk bahan baku dan tenaga kerja dengan biaya yang dianggarkan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulisan dalam melakukan penelitian. Beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan untuk mendukung penelitian ini sebagai berikut :

Mukin, *et al.* (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Dana Bantuan Sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sikka. Dari hasil penelitiannya, penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam pengendalian anggaran masih belum efektif karena belum adanya pemisahan biaya antara biaya terkendali dan biaya tidak terkendali, dan belum adanya sistem pelaporan biaya yang sesuai dengan konsep akuntansi pertanggungjawaban. Namun, Kantor Dinas Sosial sudah memenuhi syarat akuntansi pertanggungjawaban. Pengendalian anggaran juga sudah tergolong efisien karena tidak terdapat selisih anggaran dan realisasi yang merugikan.

Bawang, *et al.* (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya pada Pintar Asia Swalayan Maumere. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pintar Asia Swalayan Maumere belum sepenuhnya menerapkan syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban karena dalam proses penyusunan anggaran biaya belum melibatkan semua unit

yang ada dalam perusahaan tersebut dan belum ada pemisahan biaya antara biaya terkendali dan tidak terkendali. Pengendalian biaya juga belum sepenuhnya efisien karena masih terdapat selisih antara biaya yang dianggarkan dengan biaya yang direalisasikan. Untuk itu, perusahaan harus segera memenuhi syarat akuntansi pertanggungjawaban untuk mencapai efisiensi biaya.

Labangu *et al.* (2023). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya pada PT. Pegadaian Cabang Kendari. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PT. Pegadaian Cabang Kendari belum sepenuhnya menerapkan syarat akuntansi pertanggungjawaban, karena PT. Pegadaian Cabang Kendari belum menerapkan salah satu syarat akuntansi pertanggungjawaban, yaitu pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali. Serta belum melakukan pengendalian biaya yang baik. Hal ini dapat dilihat dari analisis terhadap selisih anggaran dan realisasi biaya, di mana ada beberapa biaya yang melebihi anggaran yang telah ditetapkan, seperti biaya administrasi bank, biaya perlengkapan kantor dan biaya perlengkapan rumah tangga.

Torina *et al.* (2022). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dengan Anggaran Sebagai Pengendalian Biaya pada Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu telah menerapkan akuntansi pertanggungjawaban dengan cukup baik, dilihat dari struktur organisasi yang jelas mengenai pembagian wewenang dan tanggung jawab. Penyusunan anggarannya mengacu pada rencana anggaran 5 tahun dan rencana kerja 1 tahun. Namun, Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu belum melakukan pemisahan biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Tetapi Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu telah membuat laporan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi anggaran, yang memperlihatkan besarnya perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, serta selisihnya.

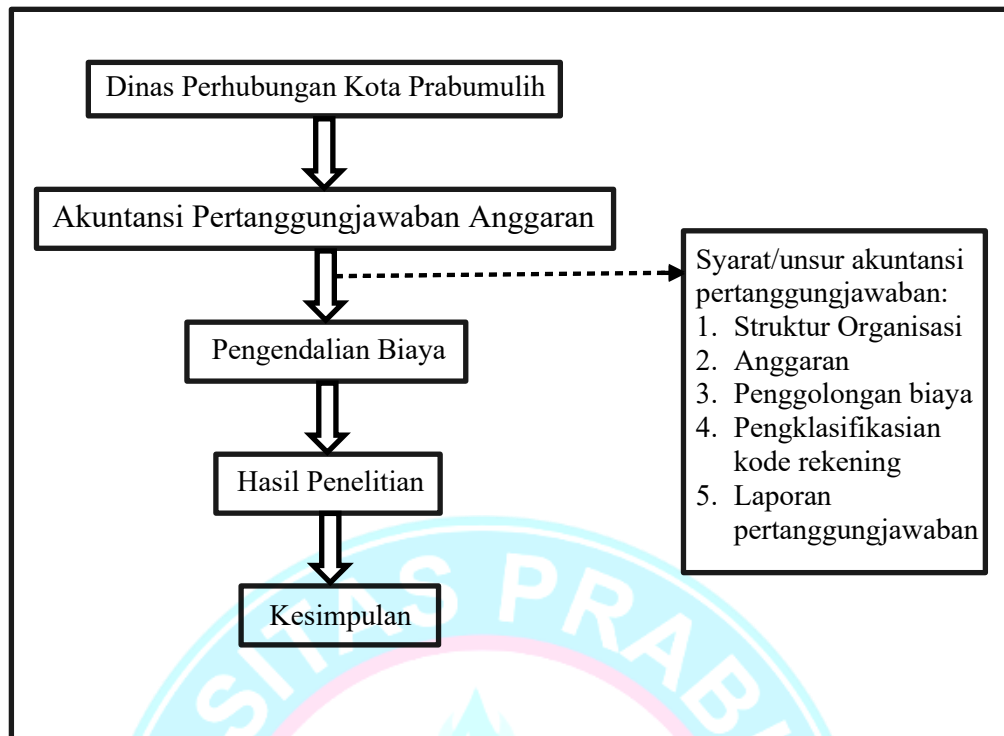
Sharon, *et al* (2021) Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya pada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara telah

menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban dengan baik yang memenuhi seluruh syarat-syarat dan karakteristik akuntansi pertanggungjawaban. Dengan menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban yang baik dan sesuai standar maka dapat membuat perusahaan melaksanakan pengendalian biaya dengan efektif dan efisien.

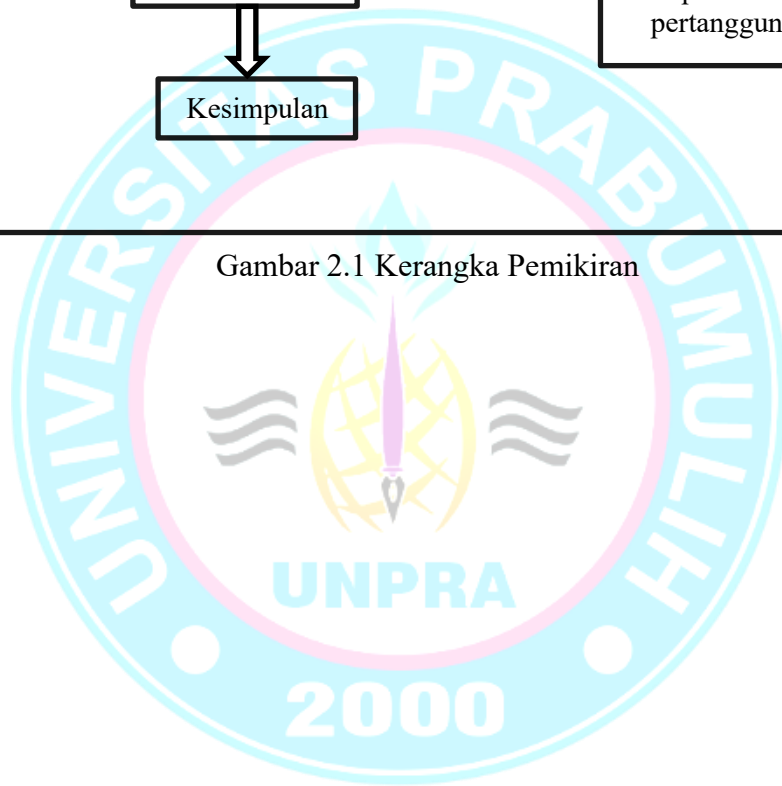
Dari kelima penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada waktu penelitian, dimana penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan pada tahun terbaru yaitu tahun 2025. Karena penelitian sebelumnya dilakukan ada pada tahun 2021, 2022 dan 2023. Adapun perbedaan lain terletak pada objek penelitian, pada penelitian yang dilakukan oleh penulis bertempat pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana kinerja Dinas Perhubungan Kota Prabumulih dalam menerapkan akuntansi pertanggungjawaban anggaran dalam mengendalikan biaya sesuai dengan syarat-syarat/unsur yang harus dipenuhi agar penerapan akuntansi pertanggungjawaban berjalan dengan baik. Adapun Kerangka pemikiran yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana suatu penelitian dilakukan. Lokasi penelitian dalam penelitian ini ialah pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih, yang terletak di Jl. Lingkar Timur, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Gedung Terminal Kota Prabumulih Sumatera Selatan.

##### **2. Waktu Penelitian**

Waktu dalam penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober Tahun 2025 sampai dengan bulan April 2026.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian, seorang peneliti diwajibkan untuk memilih jenis penelitian yang sesuai. Jenis penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis (Sujarweni, 2025) yaitu sebagai berikut:

##### **1. Penelitian Kuantitatif**

Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang diperoleh melalui penerapan prosedur statistik atau metode lain dari kuantifikasi (pengukuran).

##### **2. Penelitian Kualitatif**

Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau penulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan/atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi tertentu dalam suatu keadaan tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk

memberikan gambaran secara mendalam mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban anggaran sebagai bentuk pengendalian biaya pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih.

### **3.3 Jenis Dan Sumber Data**

#### **3.3.1 Jenis Data**

Jenis data adalah jenis informasi yang diperoleh dari lapangan yang digunakan untuk bahan penelitian (Sujarweni, 2025). Berdasarkan jenisnya, data terbagi menjadi dua (Sugiyono, 2022) yaitu sebagai berikut:

##### **a. Data Kuantitatif**

Data kuantitatif adalah data yang memiliki kecenderungan yang dapat dilakukan dengan teknik statistik, data tersebut berbentuk angka atau skor dan diperoleh dengan menggunakan alat pengumpul data yang jawabanya menggunakan skor atau pertanyaan yang diberi bobot.

##### **b. Data Kualitatif**

Data kualitatif adalah data yang berbentuk narasi, kata-kata, atau gambar. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, data yang mengandung makna. Dalam pengambilan data kecenderungan dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, sehingga pada data kualitatif tidak menekan pada angka tetapi lebih menekankan pada makna.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data kualitatif untuk melakukan penelitian pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih.

#### **3.3.2 Sumber Data**

Sumber data adalah data yang merujuk pada sumber dari mana informasi penelitian itu diperoleh. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua (Sujarweni, 2025) yaitu sebagai berikut:

##### **a. Data primer**

Data primer adalah informasi yang didapat langsung dari orang yang diwawancarai melalui kuesioner, diskusi kelompok, atau survei, dan juga melalui hasil wawancara peneliti dengan informan. Data yang bersumber dari data primer ini bersifat data mentah dan harus diolah lagi.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang didapat dari catatan, buku, majalah seperti laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan, laporan dari pemerintah, artikel, referensi berupa teori, dan lain sebagainya. Data yang berasal dari data sekunder ini tidak perlu diproses atau diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang terlibat dalam pengelolaan anggaran. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti data laporan realisasi anggaran keuangan instansi Dinas Perhubungan Kota Prabumulih.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan paling penting dalam penelitian, mengingat tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan informasi. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan datanya, peneliti tidak akan memperoleh data yang sesuai dengan kriteria data yang sudah ditentukan. Berikut beberapa teknik dalam pengumpulan data kualitatif (Sugiyono, 2022) yaitu sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi adalah kegiatan memperoleh informasi dan data dengan cara melihat secara langsung objek yang sedang diteliti. Observasi juga merupakan kegiatan penelitian berupa peninjauan langsung terhadap aktivitas serta kondisi di suatu lokasi penelitian.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat,

cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Bahan dokumenter terbagi menjadi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memo, kliping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain.

#### 4. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, membaca, dan mempelajari kajian teoritis atau referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti dari sumber seperti buku, jurnal, artikel, internet serta sumber lainnya (Mendrofa & Susilowati, 2024).

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu observasi, di mana penulis melakukan pengamatan langsung untuk menemukan praktik penerapan akuntansi pertanggungjawaban seperti apa yang dilakukan di lapangan. Kemudian melakukan wawancara dengan informan, seperti kepala dinas, subbagian keuangan, bendahara dan pihak lain yang terkait, untuk mendapatkan informasi mendalam terkait akuntansi pertanggungjawaban anggaran sebagai bentuk pengendalian biaya. Melakukan dokumentasi sebagai bukti nyata dari penelitian penulis dan studi pustaka yang digunakan untuk mengumpulkan data dari literatur, seperti buku, jurnal, *e-book*, atau artikel yang relevan guna memperkuat pemahaman tentang penelitian yang dilakukan.

### 3.5 Populasi dan Sampel

#### 3.5.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sujarweni, 2025).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Perhubungan Kota Prabumulih yang mengelola anggaran serta informasi data laporan realisasi anggaran pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih.

#### 3.5.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan dalam penelitian. Jika populasi besar, peneliti tidak

mungkin mengambil semuanya untuk penelitian, misalnya karena adanya keterbatasan dana, tenaga, dan waktu; maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Hasil yang didapatkan dari mempelajari sampel itu nantinya dapat diterapkan sebagai kesimpulan bagi keseluruhan populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili dan harus valid, yaitu bisa mengukur sesuatu yang seharusnya diukur (Sujarweni, 2025).

Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Perhubungan Kota Prabumulih yang mengelola anggaran serta informasi data laporan realisasi anggaran tahun 2024 pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih.

### 3.5.3 Teknik Sampling

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Untuk memilih sampel yang akan dijadikan subjek dalam penelitian, ada berbagai pengambilan sampel yang dapat digunakan. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu *Probability Sampling* dan *Nonprobability Sampling* (Sugiyono, 2022) yaitu sebagai berikut:

#### 1. *Probability Sampling*

*Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang di mana setiap bagian atau individu dari seluruh populasi dapat memberikan peluang atau kesempatan yang setara untuk setiap bagian dari keseluruhan kelompok untuk terpilih sebagai bagian dari sampel. Teknik ini mencakup beberapa jenis, yaitu *simple random sampling*, *proportionate stratified random sampling*, *disproportionate stratified random sampling*, dan *sampling cluster*.

#### 2. *Nonprobability Sampling*

*Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap bagian atau individu dari populasi tidak memberikan peluang atau kesempatan yang setara untuk setiap bagian dari keseluruhan kelompok untuk terpilih sebagai bagian dari sampel. Teknik ini mencakup, *sampling sistematis*, *kuota*, *aksidental*, *purposive*, *jenuh*, serta *snowball*.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *Nonprobability Sampling*, yaitu *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Dalam hal ini, peneliti memilih kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu tentang informasi data terbaru

yang mendukung analisis penerapan akuntansi pertanggungjawaban anggaran sebagai bentuk pengendalian biaya pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih.

### 3.6 Metode Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah dengan statistik dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Dengan demikian, teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan masalah (Sujarweni, 2025). Dalam analisis data kualitatif terbagi menjadi empat aktivitas (Sugiyono, 2022) yaitu sebagai berikut:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Kegiatan utama dalam setiap upaya penelitian adalah mengumpulkan data. Pada penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka yang mendukung penelitian pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang dikumpulkan dari lapangan harus dicatat dengan teliti dan rinci. Oleh karena itu, data harus segera dianalisis dengan mengurangnya. Mereduksi data berarti mencari tema dan polanya, merangkum, memilih, dan memfokuskan pada yang penting. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada melihat data dari laporan realisasi anggaran serta merangkum jawaban dari informan yang berkaitan dengan syarat-syarat/unsur yang digunakan sebagai landasan utama dari akuntansi pertanggungjawaban anggaran.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

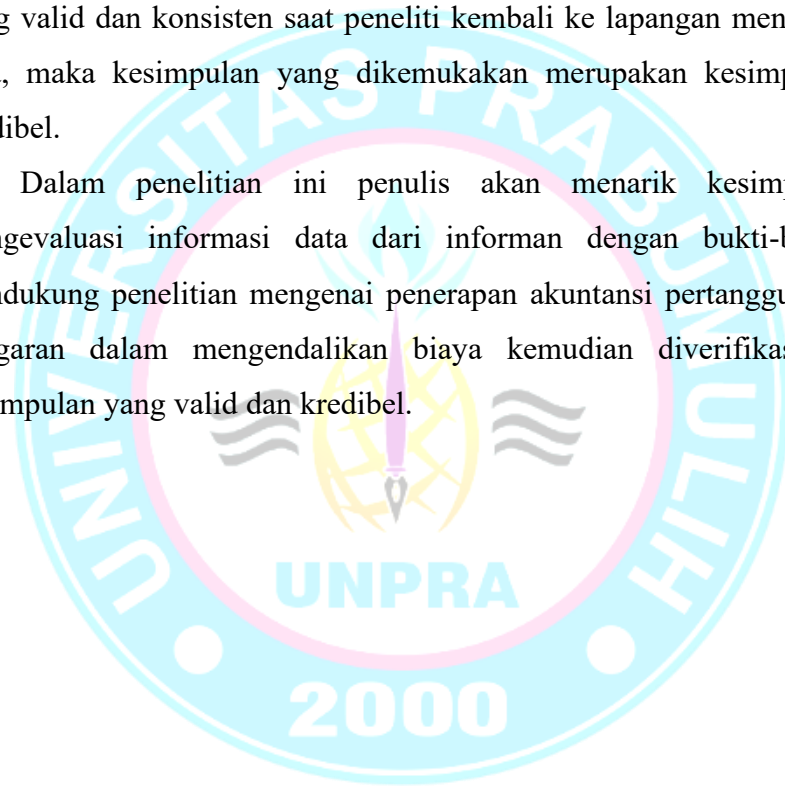
Setelah reduksi data, tahap berikutnya yaitu menyajikan informasi data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *flowchart*, dan sejenisnya. Namun, cara yang paling umum digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif yaitu melalui teks yang bersifat naratif. Dalam penelitian ini, penulis menyajikan data dalam bentuk naratif dan tabel. Data yang akan penulis sajikan adalah data

yang diperoleh dari lapangan seperti data jawaban dari informan dan data laporan pertanggungjawaban yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih.

4. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Setelah melakukan penyajian data, langkah ke empat selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dalam penelitian ini penulis akan menarik kesimpulan dan mengevaluasi informasi data dari informan dengan bukti-bukti yang mendukung penelitian mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban anggaran dalam mengendalikan biaya kemudian diverifikasi menjadi kesimpulan yang valid dan kredibel.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Prabumulih**

Dinas Perhubungan Kota Prabumulih merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang beralamat di Jl. Lingkar Timur Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Gedung Terminal Kota Prabumulih. Dulunya, untuk urusan perhubungan dan informasi di Kota Prabumulih ini bernaung di bawah satu atap yang bernama Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (DISKOMINFO). Namun, karena adanya perubahan nomenklatur, instansi tersebut kini terbagi menjadi dua bagian, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Perhubungan.

Sebagai instansi teknis daerah, Dinas Perhubungan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan teknis di bidang lalu lintas, angkutan jalan, serta pengelolaan Penerangan Jalan Umum. Dinas Perhubungan dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Prabumulih (PERWAKO) Nomor 41 Tahun 2025 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Prabumulih yang menjadi dasar operasional dalam penyelenggaraan kegiatan serta pengelolaan anggaran sekaligus menjadi acuan utama dalam mewujudkan tata kelola instansi yang transparan dan akuntabel.

##### **4.1.2 Visi Dan Misi Dinas Perhubungan Kota Prabumulih**

###### **1. Visi**

“Membangun pelayanan transportasi yang transparan, akuntabel dan inovatif”.

- a. Membangun pelayanan transportasi, artinya menciptakan pelayanan perhubungan yang efektif dan cekatan.
- b. Yang transparan, artinya memberikan pelayanan yang adil, cepat untuk menciptakan pelayanan yang bersih.
- c. Yang akuntabel, artinya menciptakan pelayanan yang terpercaya oleh masyarakat.

- d. Yang Inovatif, artinya menciptakan pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat terkait pelayanan perhubungan.

## 2. Misi

- a. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.
- b. Menyelenggarakan layanan transportasi yang berdaya asing.
- c. Terwujudnya pelayanan perhubungan yang selamat, tertib, lancar, dan terpadu.
- d. Terwujudnya pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang aman, nyaman, dan mengutamakan keselamatan.
- e. Mewujudkan fasilitas keselamatan di bidang perhubungan yang baik dan merata.

### 4.1.3 Nilai Organisasi Dinas Perhubungan Kota Prabumulih

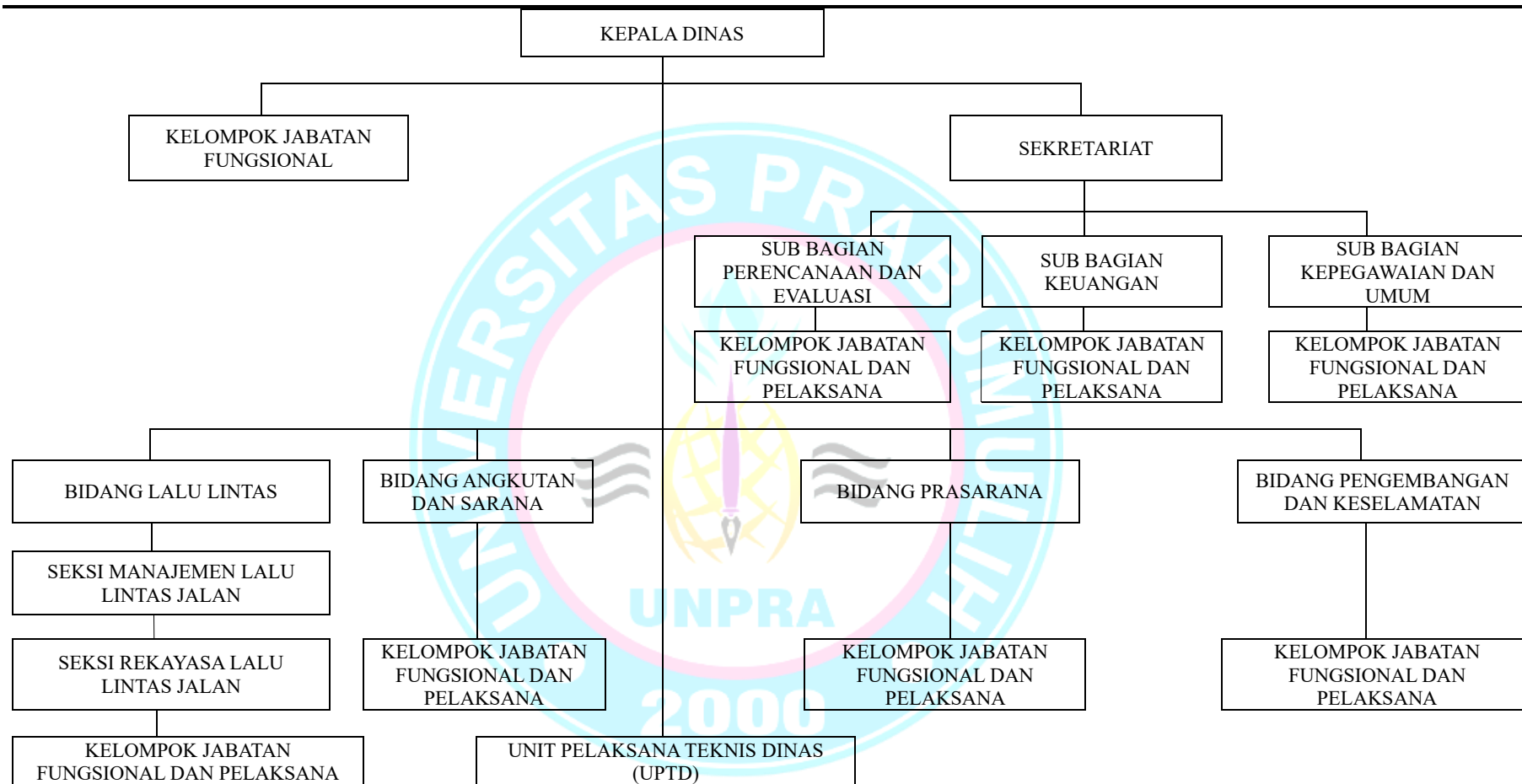
Nilai organisasi Dinas Perhubungan Kota Prabumulih tercermin dalam 5 Citra Manusia Perhubungan yakni :

1. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman.
3. Tangguh menghadapi tantangan.
4. Terampil dan berperilaku gesit, ramah serta lugas.
5. Tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan.

### 4.1.4 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Prabumulih

Struktur organisasi berfungsi untuk memberikan petunjuk dan gambaran mengenai pembagian dan pengelompokkan sistem kerja untuk melaksanakan aktivitas dalam suatu organisasi. Struktur organisasi pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih ini telah di atur dan tertuang dalam Peraturan Wali Kota Prabumulih (PERWAKO) Nomor 41 Tahun 2025 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Prabumulih. Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Prabumulih dapat digambarkan sebagai berikut:

### STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH



Sumber: Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 41 Tahun 2025

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Prabumulih

Berdasarkan struktur organisasi di atas, maka uraian susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Prabumulih adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari : Subbagian Perencanaan dan Evaluasi, Subbagian Keuangan dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.
3. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari : Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan dan Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan.
4. Bidang Angkutan dan Sarana.
5. Bidang Prasarana.
6. Bidang Pengembangan dan Keselamatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksanaan.

#### **4.1.5 Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Prabumulih**

Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Prabumulih sebagaimana telah diatur sesuai dengan Peraturan Walikota Prabumulih nomor 41 tahun 2025 tentang tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dinas daerah Kota Prabumulih yang meliputi:

1. Tugas dan fungsi kepala dinas
  - a. Tugas kepala dinas :
    - a) Menyelenggarakan, menetapkan dan melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka melaksanakan tugas desentralisasi di bidang Perhubungan.
    - b) Menyelenggarakan penyiapan perumusan serta melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan dan menyusun rencana umum, analisis, evaluasi, pengembangan dan pengawasan perwujudan serta penetapan jaringan transportasi darat.
  - b. Fungsi kepala dinas perhubungan :
    - a) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
    - b) Pelaksanaan pembinaan operasional di bidang perhubungan.
    - c) Penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang perhubungan.

## 2. Tugas dan fungsi sekretaris

### a. Tugas sekretaris dinas perhubungan :

- a) Melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan umum, perlengkapan, informasi, kepegawaian, hukum, pendidikan, keuangan, perencanaan, program dan evaluasi, rumah tangga, naskah dinas dan pelaporan.
- b) Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan, Merumuskan saran dan pertimbangan Kepala Dinas Perhubungan tentang langkah dan kegiatan yang perlu diambil dalam bidang kesekretariatan.

### b. Fungsi sekretaris dinas perhubungan :

- a) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga perlengkapan, hukum, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat.
- b) Pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- c) Pelaksanaan tata kelola keuangan.

## 3. Tugas dan fungsi subbagian perencanaan dan evaluasi

### a. Tugas subbagian perencanaan dan evaluasi :

- a) Menyusun rencana anggaran belanja rutin maupun pembangunan baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara maupun dari sumber lainnya.
- b) Menyusun program laporan dinas baik laporan penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan.
- c) Menyusun saran dan pertimbangan Sekretaris dinas perhubungan tentang langkah dan kegiatan yang perlu diambil bidang perencanaan dan evaluasi.

### b. Fungsi subbagian perencanaan dan evaluasi :

- a) Penyusunan rencana anggaran belanja rutin maupun pembangunan baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara maupun dari sumber lainnya.
- b) Penyusunan program kerja tahunan, program kerja lima tahunan pemerintahan dan pembangunan bidang perhubungan yang telah dikoordinasikan dengan bidang terkait.
- c) Penyusunan rencana pembangunan bidang perhubungan, jangka menengah dan jangka panjang yang telah dikoordinasikan dengan bidang terkait.

4. Tugas dan fungsi subbagian keuangan
  - a. Tugas subbagian keuangan :
    - a) Mengerjakan penyiapan bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan pembukuan dan pelaporan keuangan.
    - b) Menyusun saran dan pertimbangan Sekretaris tentang langkah dan kegiatan yang perlu diambil dalam bidang keuangan.
  - b. Fungsi subbagian keuangan :
    - a) Pelaksanaan pengelolaan tata usaha keuangan dan administrasi keuangan.
    - b) Penyiapan bahan dan penyusunan anggaran.
    - c) Pelaksanaan tata kelola keuangan, meliputi pembukuan, penyusunan, pertanggungjawaban dan pengamanan dokumen keuangan.
5. Tugas dan fungsi subbagian kepegawaian dan umum
  - a. Tugas subbagian kepegawaian dan umum :
    - a) Melaksanakan urusan umum, perlengkapan, informasi, kepegawaian, hukum, pendidikan, rumah tangga dan naskah dinas.
    - b) Menyusun saran dan pertimbangan Sekretaris tentang langkah dan kegiatan yang perlu diambil dalam bidang keuangan.
  - b. Fungsi subbagian kepegawaian dan umum :
    - a) Pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan.
    - b) Pelaksanaan proses penerimaan, pengelolaan, pendistribusian, penggandaan, pengiriman dan pengarsipan surat-surat masuk dan keluar.
    - c) Pengurusan rumah tangga dinas yang meliputi keamanan, kebersihan, pemeliharaan, perlengkapan/peralatan kantor.
6. Tugas dan fungsi bidang lalu lintas
  - a. Tugas bidang lalu lintas :
    - a) Melaksanakan perumusan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas.
    - b) Merumuskan saran dan pertimbangan Kepala Dinas Perhubungan tentang langkah dan kegiatan yang perlu diambil dalam bidang Manajemen Lalu Lintas Jalan, Rekayasa Lalu Lintas Jalan, dan Analisis Dampak Lalu Lintas.

b. Fungsi bidang lalu lintas :

- a) Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang manajemen lalu lintas; rekayasa lalu lintas; dan analisis dampak lalu lintas.
- b) Penyusunan rencana, program dan evaluasi di bidang lalu lintas, di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas.
- c) Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas.

7. Tugas dan fungsi seksi manajemen lalu lintas jalan

a. Tugas seksi manajemen lalu lintas jalan :

- a) Melaksanakan penyiapan, pengerjaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Manajemen Lalu Lintas Jalan, menyiapkan dan melaksanakan petunjuk teknis di bidang Manajemen Lalu Lintas Jalan.
- b) Menyusun laporan, saran, dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Lalu Lintas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

b. Fungsi seksi manajemen lalu lintas jalan :

- a) Pengumpulan, pengolahan data, penyusunan rencana dan program di bidang manajemen lalu lintas.
- b) Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas.
- c) Pengerjaan penetapan rekayasa jaringan lalu lintas saat adanya kegiatan pemerintah kota/masyarakat yang dapat menghambat arus lalu lintas.
- d) Pengerjaan pengawasan terhadap kondisi arus lalu lintas secara intensif.

8. Tugas dan fungsi seksi rekayasa lalu lintas jalan

a. Tugas seksi rekayasa lalu lintas jalan :

- a) Melaksanakan penyiapan, pengerjaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Rekayasa Lalu Lintas Jalan,
- b) Menyiapkan dan melaksanakan petunjuk teknis di bidang Rekayasa Lalu Lintas Jalan.
- c) Menyusun laporan, saran, dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Lalu Lintas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil.

b. Fungsi seksi rekayasa lalu lintas jalan :

- a) Pengerjaan pengumpulan, pengolahan data, penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan dan kewenangan dibidang rekayasa lalu lintas jalan.
- b) Penyusunan dan perumusan pedoman, standar, norma, kriteria dan prosedur dibidang rekayasa lalu lintas jalan.
- c) Penyusunan rencana, program dan evaluasi bidang rekayasa lalu lintas jalan.
- d) Pelaksanaan manajemen patroli dan pengawalan untuk kelancaran arus lalu lintas jalan bagi pejabat, tamu daerah dan masyarakat yang membutuhkan.

9. Tugas dan fungsi bidang angkutan dan sarana

a. Tugas bidang angkutan dan sarana :

- a) Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Angkutan dan Sarana.
- b) Merumuskan saran dan pertimbangan Kepala Dinas Perhubungan tentang langkah dan kegiatan yang perlu diambil dalam bidang Angkutan Dalam Trayek, Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang, dan Seksi Pengujian Sarana.

b. Fungsi bidang angkutan dan sarana :

- a) Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang Angkutan dan Sarana.
- b) Perumusan rencana, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang sarana transportasi.
- c) Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan angkutan umum yang wilayah pelayanannya dalam kota.
- d) penyusunan dan penetapan jaringan lalu lintas angkutan barang pada jaringan jalan kota.
- e) Pelaksanaan rekayasa kebutuhan sarana perhubungan.

10. Tugas dan fungsi bidang prasarana

a. Tugas bidang prasarana :

- a) Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan di bidang Pembangunan Prasarana, Pengoperasian Prasarana, dan Perawatan Prasarana.

- b) Merumuskan saran dan pertimbangan Kepala Dinas Perhubungan tentang langkah dan kegiatan yang perlu diambil dalam bidang Seksi Perencanaan dan Pembangunan, Pengoperasian, dan Perawatan Prasarana.
  - b. Fungsi bidang prasarana
    - a) Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang prasarana di bidang perhubungan.
    - b) Perumusan rencana pembangunan prasarana di bidang perhubungan.
    - c) Perumusan rencana, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang prasarana perhubungan.
- 11. Tugas dan fungsi bidang pengembangan dan keselamatan
  - a. Tugas bidang prasarana :
    - a) Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan transportasi.
    - b) Merumuskan saran dan pertimbangan Kepala Dinas tentang langkah dan kegiatan yang perlu diambil dalam bidang Pemanduan Moda dan Teknologi Perhubungan, Lingkungan Perhubungan, Keselamatan.
  - b. Fungsi bidang prasarana :
    - a) Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang Pemanduan Moda dan Teknologi Perhubungan, Lingkungan Perhubungan, dan Keselamatan.
    - b) Perumusan rencana, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di bidang Pemanduan Moda dan Teknologi Perhubungan, Lingkungan Perhubungan, dan Keselamatan.
- 12. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas Perhubungan, yang terdiri atas UPTD Pengelolaan Terminal, UPTD Perparkiran, dan UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor.
- 13. Kelompok jabatan fungsional dan kelompok jabatan pelaksana
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Jabatan pelaksana merupakan jabatan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana serta pola hubungan kerja jabatan fungsional dan jabatan pelaksana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

## 4.2 Hasil Penelitian

Sesuai dengan landasan teori yang telah dijabarkan pada bab dua, terdapat beberapa syarat/unsur yang menjadi landasan utama dan harus dipenuhi dalam instansi agar penerapan akuntansi pertanggungjawaban dapat berjalan dengan baik. Berikut adalah hasil analisis mengenai Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Anggaran Sebagai Bentuk Pengendalian Biaya pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih :

### 4.2.1 Syarat-Syarat Akuntansi Pertanggungjawaban

#### 1. Struktur Organisasi

Syarat pertama dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban adalah struktur organisasi. Struktur organisasi menjadi syarat utama agar akuntansi pertanggungjawaban bisa berjalan dengan baik. Melalui struktur organisasi ini, pengendalian dalam instansi dapat diperkuat dengan cara membentuk sistem pertanggungjawaban di setiap bidang atau bagian.

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Arlus mengenai aliran pertanggungjawaban dan pendelegasian wewenang :

*“Kalau di Dinas Perhubungan ini memang sudah mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan aliran tanggung jawab dan posisi yang jelas. Aliran penumpahan tanggung jawab bergerak dari tingkat atas ke tingkat paling bawah seperti pemberian instruksi, tugas, dan wewenang. Sedangkan, untuk aliran pertanggungjawabannya mengalir dari tingkat bawah ke atas seperti pelaporan pertanggungjawabannya. Terkait penempatan staf atau pegawai itu, sebenarnya ada yang tidak sesuai dengan kompetensi yang*

*mereka miliki, namun mereka akan belajar menyesuaikan diri dan mengikuti pelatihan serta diklat sesuai dengan jabatan yang mereka dapat.*

*Selain itu, pendelegasian wewenang dilakukan melalui pembagian tugas kepada kepala bidang masing-masing, terutama untuk yang menduduki jabatan Eselon III dan IV seperti sekretaris, kepala bidang (kabid), dan kepala UPTD, yang ada dalam struktur organisasi, dan itu sudah tertuang dalam SK PPTK (Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan). Setiap kepala bidang memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatan dan menjalankan program kerja sesuai dengan bidang tugas masing-masing.” (Arlus, Plt Kepala Dinas Perhubungan).*

Selanjutnya, informasi tentang pengangkatan jabatan yang diperoleh dari percakapan dengan Ibu Nia Sastiana sebagai berikut:

*“Terkait dengan pengangkatan jabatan yang terdapat dalam struktur organisasi, itu telah diatur oleh kebijakan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2025 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, yang dimana mekanismenya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Struktur organisasi yang ada juga menggambarkan pembagian wewenang, tugas dan tanggungjawab yang jelas.”(Nia Sastiana, staf atau pegawai subbagian Perencanaan dan Evaluasi).*

Kemudian, hasil percakapan dengan Bapak Jamri Murdani memperjelas kembali bahwa:

*“Penetapan tugas dan tanggung jawab pada Dinas Perhubungan ini sudah berjalan secara optimal dan bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan struktur organisasi yang ada, sehingga operasional kerja dapat tercapai sesuai rencana.”(Jamri Murdani, Bendahara Pengeluaran).*

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kota Prabumulih telah memiliki struktur organisasi yang jelas sebagai syarat/unsur utama dari akuntansi pertanggungjawaban. Struktur organisasi pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih telah memenuhi unsur akuntansi pertanggungjawaban karena memiliki pembagian wewenang yang jelas berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2025 dan SK PPTK yang ada. Alur kerja

di instansi ini sudah teratur, di mana instruksi turun dari atasan dan laporan pertanggungjawaban naik dari bawahan sesuai tingkatan jabatan. Meskipun terdapat staf yang ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, hal ini dapat diatasi melalui proses adaptasi serta program pelatihan (diklat). Dengan adanya wewenang penuh bagi pejabat Eselon III dan IV untuk mengelola program kerja masing-masing, struktur ini terbukti berfungsi dengan baik dalam mendukung kelancaran operasional yang akuntabel.

## 2. Anggaran

Syarat kedua dalam menjalankan akuntansi pertanggungjawaban adalah adanya anggaran. Anggaran ini berfungsi sebagai alat serta bentuk untuk mengendalikan biaya. Dengan adanya anggaran, instansi memiliki batasan dalam mengeluarkan uang dan bisa mengawasi penggunaan dana supaya tidak terjadi pemborosan. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk menilai kinerja instansi serta untuk mendukung setiap kegiatan dan program kerja yang sudah direncanakan agar bisa terlaksana. Setiap bidang dan unit kerja yang ada dalam dinas harus ikut berpartisipasi dalam menyusun anggaran.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Jamri Murdani beliau menyatakan bahwa:

*“Pengelolaan anggaran di Dinas Perhubungan dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), yang bertujuan untuk memperkuat program-program kerja wali kota. Kemudian, anggaran yang diberikan itu sesuai dengan rencana program kerja dari masing-masing bidang yang ada dalam dinas. Adapun anggaran yang diterima itu dapat berupa uang maupun barang yang digunakan untuk mendukung kelancaran administrasi dan operasional dinas.”*(Jamri Murdani, Bendahara Pengeluaran).

Kemudian hasil dari wawancara dengan Ibu Yustia yang memperjelas kembali bahwa:

*“Pengelolaan anggaran pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih dilakukan dalam beberapa tahapan untuk jangka waktu satu tahun. Proses ini dimulai dari perencanaan dan penyusunan anggaran untuk setiap program,*

*kegiatan, serta proyek yang telah ditentukan, hingga masuk ke tahap pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi penggunaan anggaran. Dalam proses penyusunannya itu sudah ditetapkan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap program kegiatan guna memastikan seluruh target instansi dapat tercapai secara efektif.”*(Yustia Ningrum, Kepala Subbagian Keuangan).

Adapun penambahan dari hasil percakapan dengan Ibu Nia yang menyatakan bahwa:

*“Penyusunan anggaran dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unit kerja agar sesuai dengan kebutuhan dinas dalam merealisasikan program yang telah ditetapkan. Anggaran juga menjadi acuan kami. Setiap akan mengeluarkan biaya, kami cek dulu plafon anggarannya di Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) agar tidak terjadi over budget.”* (Nia Sastiana, staf atau pegawai subbagian Perencanaan dan Evaluasi).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan sejumlah narasumber di atas. Pengelolaan anggaran pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih telah berjalan dengan terstruktur dan partisipatif. Hal ini terlihat dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang melibatkan seluruh unit kerja dan diselaraskan dengan program pemerintah daerah. Dengan menggunakan DPA sebagai tolok ukur kinerja serta alat kontrol pengeluaran, instansi dapat memastikan setiap anggaran yang digunakan sesuai kebutuhan nyata agar tidak terjadi pemborosan. Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran yang mencakup tahap perencanaan hingga evaluasi ini telah mendukung pencapaian target dinas secara efektif.

### 3. Penggolongan Biaya

Syarat ketiga dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban adalah klasifikasi biaya menjadi biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Biaya terkendali adalah biaya yang dapat dipengaruhi langsung oleh pimpinan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan biaya tak terkendali adalah biaya yang tidak dapat dipengaruhi atau dikendalikan langsung oleh pimpinan pada periode tertentu. Pemisahan antara biaya yang dapat dikendalikan dengan biaya yang tidak dapat dikendalikan ini bertujuan agar laporan pertanggungjawaban mampu menyajikan data anggaran yang akurat.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka informasi yang diperoleh dari percakapan dengan Bapak Jamri yang mengungkapkan bahwa:

*“Sebenarnya dalam aktivitas operasional sehari-hari, kami ada saja biaya-biaya yang mungkin bisa kami kendalikan, seperti biaya bahan bakar kendaraan dinas, biaya pelatihan dan pengembangan pegawai, biaya pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor), biaya pemeliharaan kendaraan dinas, serta biaya gaji pegawai. Namun, ada juga biaya yang tidak dapat kami kendalikan seperti biaya kemitraan dengan pihak swasta, biaya pengadaan kendaraan baru, dan lain sebagainya.”* (Jamri Murdani, Bendahara Pengeluaran).

Kemudian dari hasil percakapan dengan Ibu Yustia yang menyatakan bahwa:

*“Berkenaan dengan biaya terkendali dan biaya tidak terkendali, di dinas kami tentunya ada biaya-biaya yang dimaksud. Hanya saja, dalam pencatatan dan proses pelaporannya itu belum digolongkan secara spesifik. Biaya di sini hanya digolongkan berdasarkan jenis belanja seperti belanja pegawai, belanja barang atau jasa, dan belanja modal peralatan dan mesin.”* (Yustia Ningrum, Kepala Subbagian Keuangan).

Berdasarkan uraian di atas, bahwa Dinas Perhubungan Kota Prabumulih dalam aktivitas operasionalnya itu telah ada biaya yang mungkin bisa dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Meskipun biaya-biaya tersebut ada, tetapi dalam pencatatan dan pelaporannya itu belum digolongkan secara spesifik berdasarkan biaya terkendali dan tidak terkendali, melainkan masih digabungkan menjadi satu laporan berdasarkan jenis belanja, seperti belanja pegawai, belanja barang atau jasa, serta belanja modal peralatan dan mesin. Oleh karena itu, penggolongan biaya ini belum mendukung penerapan akuntansi pertanggungjawaban secara optimal dalam pelaporannya.

#### 4. Pengklasifikasian Kode Rekening

Syarat keempat dalam akuntansi pertanggungjawaban adalah klasifikasi kode rekening. Setiap perusahaan, baik swasta maupun pemerintah, perlu mencatat dan melaporkan setiap pengeluaran. Selain itu, laporan ini berfungsi sebagai alat serta bentuk pengendalian biaya yang digunakan untuk mencegah penyimpangan dan pemborosan yang dapat merugikan perusahaan. Agar lebih

Mudah dipantau. Setiap biaya dikumpulkan berdasarkan bagiannya masing-masing, kemudian biaya tersebut diklasifikasikan dan diberi kode rekening.

Berikut ini merupakan hasil percakapan yang dilakukan dengan Ibu Yustia terkait pengklasifikasian kode rekening yang mengungkapkan bahwa:

*“Penggunaan kode rekening sudah dilakukan. Semua anggaran sudah diberi kode rekening sesuai dengan yang ada dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Setiap pengeluaran memiliki kode angka tersendiri agar tidak tertukar antara program yang satu dengan yang lain, serta mempermudah kami dalam memantau penggunaan anggaran di setiap bidangnya.”* (Yustia Ningrum, Kepala Subbagian Keuangan).

Selanjutnya informasi serupa dari hasil percakapan dengan Ibu Nia :

*“Dalam pemberian kode rekening untuk setiap elemen dalam laporan pertanggungjawaban pastinya sudah diberi kode rekening atau kode akunya masing-masing seperti, pendapatan kodenya 4, kemudian akun belanja daerah kodenya 5 dan lainnya itu semua punya kode rekening yang berbeda-beda.”* (Nia Sastiana, staf atau pegawai subbagian Perencanaan dan Evaluasi).

Kemudian informasi dari hasil percakapan dengan Bapak Jamri bahwa:

*“Menegenai pengklasifikasian kode rekening, tentunya kami di dinas ini sudah menggunakan klasifikasi kode rekening, karena itu sudah ada dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) langsung dan sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah.”* (Jamri Murdani, Bendahara Pengeluaran).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber di atas, Dinas Perhubungan Kota Prabumulih telah menerapkan klasifikasi kode rekening secara sistematis melalui aplikasi SIPD dan berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah. Penggunaan kode rekening yang berbeda untuk setiap program bertujuan agar setiap pengeluaran tidak tertukar dan mempermudah pengawasan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan syarat keempat sudah memadai karena pengklasifikasi kode pendapatan dan belanja telah mengikuti standar akun yang baku.

## 5. Laporan Pertanggungjawaban

Adapun syarat terakhir dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban adalah laporan pertanggungjawaban. Pelaporan ini memiliki kepentingan yang sama pentingnya dengan syarat-syarat lainnya. Laporan pertanggungjawaban berperan sebagai dasar bagi pimpinan tingkat atas untuk mengevaluasi kinerja manajer tingkat bawah. Salah satu kunci utama dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban adalah penyampaian laporan tersebut kepada pimpinan yang harus berisi informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Melalui laporan yang mendetail, pimpinan dapat lebih cepat mendeteksi pemborosan dan menentukan langkah perbaikan anggaran bagi instansi ke depannya.

Berdasarkan uraian di atas, berikut hasil percakapan yang dilakukan dengan Bapak Jamri yang menyatakan bahwa:

*"Setiap bidang atau unit kerja pasti sudah membuat laporan pertanggungjawaban berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Laporan dari masing-masing unit ini kemudian dikumpulkan dan direkap menjadi satu laporan anggaran dinas. Proses rekapitulasi ini sekarang dilakukan secara otomatis melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Laporan yang dihasilkan berbentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang isinya mencantumkan jumlah anggaran awal, jumlah uang yang sudah terpakai atau terealisasi, serta persentase pencapaiannya."*(Jamri Murdani, Bendahara Pengeluaran).

Selanjutnya, informasi serupa dari percakapan dengan Ibu Yustia yaitu:

*"Iya, pasti ada laporan pertanggungjawaban. Prosesnya dimulai dari bukti kuitansi pembayaran yang diinput ke dalam sistem, kemudian secara otomatis tercatat dalam Buku Kas Umum (BKU) dan menjadi laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fungsional. Sistem ini juga dapat diakses oleh pemerintah pusat. Setiap kegiatan operasional di dinas ini juga dapat dipantau langsung melalui sistem. Dan melalui laporan pertanggungjawaban ini, anggaran dapat digunakan sebagai alat serta bentuk pengendalian biaya dalam pengelolaan anggaran. Karena, laporan pertanggungjawaban dapat memberikan informasi tentang penggunaan anggaran dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan."* (Yustiana Ningrum, Kepala Subbagian Keuangan).

Berdasarkan informasi dari informan diatas, bahwa Dinas Perhubungan Kota Prabumulih telah menerapkan sistem pelaporan pertanggungjawaban yang terstruktur dan transparan. Setiap unit kerja, mulai dari kepala bidang hingga kepala UPTD, telah memenuhi kewajibannya dalam melaporkan setiap biaya yang digunakan. Penggunaan aplikasi SIPD memudahkan proses rekapitulasi data menjadi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) secara otomatis dan akurat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan syarat kelima dari akuntansi pertanggungjawaban di instansi ini sudah berjalan dengan baik. Berikut laporan pertanggungjawaban per program kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2024:



Tabel 4.1 Laporan Pertanggungjawaban Per Program Kegiatan  
Dinas Perhubungan Kota Prabumulih Tahun 2024

| Kode           | Uraian                                                             | Anggaran (Rp)        | Realisasi (Rp)       | Sisa (Rp)          | (%)           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| <b>2.15</b>    | <b>Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan</b>                      | <b>7.067.732.000</b> | <b>6.803.575.547</b> | <b>264.156.453</b> | <b>96.26%</b> |
| <b>2.15.01</b> | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>6.436.732.000</b> | <b>6.177.729.239</b> | <b>259.002.761</b> | <b>95.98%</b> |
| 2.15.01.2.01   | Perencanaan, Pengangara, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah     | 13.500.000           | 13.500.000           | -                  | 100.00%       |
| 2.15.01.2.02   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             | 4.413.888.149        | 4.260.136.932        | 8.674.025.081      | 96.52%        |
| 2.15.01.2.03   | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah             | 34.080.000           | 31.080.000           | 3.000.000          | 91.20%        |
| 2.15.01.2.05   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                          | 165.000.000          | 162.464.814          | 2.535.186          | 98.46%        |
| 2.15.01.2.06   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | 831.123.851          | 814.151.162          | 16.972.689         | 97.96%        |
| 2.15.01.2.07   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 503.680.000          | 476.300.000          | 27.380.000         | 94.56%        |

| Kode           | Uraian                                                                | Anggaran (Rp)      | Realisasi (Rp)     | Sisa (Rp)        | (%)           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|
| 2.15.01.2.08   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 140.460.000        | 110.375.801        | 30.084.199       | 78.58%        |
| 2.15.01.2.09   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 335.000.000        | 309.720.530        | 25.279.470       | 92.45%        |
| <b>2.15.02</b> | <b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>  | <b>631.000.000</b> | <b>625.846.308</b> | <b>5.153.692</b> | <b>99.18%</b> |
| 2.15.02.2.01   | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                  | 30.000.000         | 29.950.000         | 50.000           | 99.83%        |
| 2.15.02.2.02   | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                 | 40.000.000         | 38.450.000         | 1.550.000        | 96.13%        |
| 2.15.02.2.03   | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                                 | 20.000.000         | 20.000.000         | -                | 100.00%       |
| 2.15.02.2.04   | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir      | 20.000.000         | 20.000.000         | -                | 100.00%       |
| 2.15.02.2.05   | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                  | 99.000.000         | 96.023.108         | 2.976.892        | 96.99%        |

| Kode         | Uraian                                                                                                                                                 | Anggaran (Rp)        | Realisasi (Rp)       | Sisa (Rp)          | (%)           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                                     | 197.000.000          | 196.428.200          | 571.800            | 99.71%        |
| 2.15.02.2.07 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota                                                                   | 30.000.000           | 29.995.000           | 5.000              | 99.98%        |
| 2.15.02.2.08 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ dijalan                                                                                                            | 20.000.000           | 20.000.000           | -                  | 100.00%       |
| 2.15.02.2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                     | 155.000.000          | 155.000.000          | -                  | 100.00%       |
| 2.15.02.2.13 | Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 20.000.000           | 20.000.000           | -                  | 100.00%       |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                                                        | <b>7.067.732.000</b> | <b>6.803.575.547</b> | <b>264.156.453</b> | <b>96.26%</b> |

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Prabumulih (Data Diolah Peneliti Tahun 2026)

Berdasarkan Tabel 4.1 Laporan Pertanggungjawaban Per Program Kegiatan tahun 2024 pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih, bahwa total keseluruhan dari rencana anggaran pada tahun 2024 berjumlah sebesar Rp7.067.732.000 dan terealisasi sebesar Rp264.156.453, sehingga persentasenya sampai pada 96,26%. Hal ini mengindikasikan bahwa anggaran yang terjadi pada tahun 2024 telah dimanfaatkan secara optimal. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Pasal 249 ayat (7), jika hasil penjumlahan nilai kinerja anggaran  $> 90$ , dapat dikategorikan sebagai sangat baik. Oleh karena itu, nilai 96,26% ini menunjukkan Dinas Perhubungan Kota Prabumulih sudah sangat baik dalam menggunakan dan mempertanggungjawabkan anggaran.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Ibu Yustia mengenai peningkatan kinerja yang signifikan di tahun 2024 sebagai berikut:

*“Peningkatannya karena perbaikan koordinasi dan pemantauan anggaran yang lebih ketat setiap bulan. Nah untuk penyerapan yang mencapai 96,26% di tahun 2024 karena pada tahun itu kami sudah beralih sepenuhnya ke aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Perbaikan utamanya terletak pada integrasi data, dulu prosesnya ini masih manual dan terpisah-pisah. Sekarang, dari perencanaan sampai pelaporan, semuanya satu pintu secara real-time. Pimpinan juga bisa memantau serapan harian secara digital, jadi kalau ada kegiatan yang melambat, bisa langsung ditegur dan dipercepat. Intinya, SIPD membuat koordinasi antarbidang agar lebih sinkron dan pengawasan anggaran jauh lebih ketat dibandingkan tahun sebelumnya.”* (Yustiana Ningrum, Kepala Subbagian Keuangan).

Selain itu, peningkatan kinerja ini juga dipicu oleh pembaruan teknologi informasi yang digunakan oleh pihak dinas untuk menjamin keakuratan data. Terkait hal tersebut, Bapak Jamri Murdani mempertegas perbedaan signifikan pada sistem pelaporan saat ini:

*“Perbaikan utama kami terletak pada penyerapan anggaran yang kini benar-benar dimaksimalkan sesuai dengan rencana kegiatan. Perbedaan lainnya juga ada pada sistem. Kalau pada tahun 2021–2023 itu, kami masih memakai SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) yang prosesnya masih setengah sistem, setengah manual. Sedangkan di tahun 2024 ini ada*

*pembaruan aplikasi yaitu SIPD dari Kemendagri yang di mana aplikasi ini sudah dimaksimalkan fungsinya, mulai dari input data sampai laporan akhir sudah otomatis dan jauh lebih maksimal.” (Jamri Murdani, Bendahara Pengeluaran).*

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kinerja anggaran tahun 2024 merupakan hasil dari digitalisasi sistem dan penguatan pengawasan. Peralihan penuh dari sistem SIMDA yang bersifat semi-manual ke aplikasi SIPD telah mengubah pola kerja menjadi lebih terintegrasi dan transparan. Dengan pelaporan otomatis secara real-time, pimpinan memiliki kontrol penuh untuk memantau serapan anggaran setiap harinya, sehingga kendala di lapangan dapat dideteksi dan diatasi lebih cepat. Secara keseluruhan, integrasi teknologi ini tidak hanya meningkatkan akurasi data keuangan, tetapi juga menciptakan koordinasi antarbidang yang lebih sinkron dan akuntabel.

#### **4.2.2 Pusat Pertanggungjawaban**

Setiap pimpinan harus memahami tanggung jawabnya dengan jelas. Oleh karena itu, organisasi harus memiliki bagan atau struktur organisasi sebagaimana dipersyaratkan dalam unsur akuntansi pertanggungjawaban yang harus dipenuhi, guna untuk menggambarkan secara jelas batasan-batasan tanggung jawab dan pelaporan. Tanggung jawab pimpinan harus dijelaskan secara lengkap dalam deskripsi tertulis. Atas dasar itulah, perusahaan atau organisasi perlu memiliki yang namanya pusat pertanggungjawaban (Nursanty *et al.*, 2022). Pusat pertanggungjawaban pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih merupakan unit organisasi yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab penuh atas aktivitas serta penggunaan anggaran di setiap bidang dan unitnya.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa unit kerja yang ada dalam setiap dinas, dapat diklasifikasikan sebagai pusat biaya dan pusat pendapatan. Berikut adalah hasil dari percakapan dengan Bapak Arlus yang mengatakan bahwa :

*“Kalau terkait dengan pusat pertanggungjawaban, sebenarnya hampir setiap organisasi atau dinas di pemerintahan daerah itu merupakan pusat biaya, karena kami semua bertanggung jawab untuk mengelola biaya. Dishub juga*

*termasuk ke dalam pusat biaya. Tapi, selain pusat biaya, Dishub juga menjadi salah satu dari pusat pendapatan melalui pemungutan retribusi perpajakan. Jadi, untuk pusat pertanggungjawaban yang ada di sini adalah pusat biaya dan juga pusat pendapatan.”(Arlus, Plt. Kepala Dinas Perhubungan).*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan menjadi pusat biaya dan pusat pendapatan. Penjelasan lebih rinci mengenai pembagian tugas yang disampaikan oleh Bapak Jamri Murdani, beliau mengatakan bahwa:

*“Pusat pertanggungjawaban di Dinas Perhubungan ini kami bagi berdasarkan struktur organisasi yang ada. Semuanya masuk dalam kategori Pusat Biaya, karena fokus kami adalah pelayanan, bukan mencari laba. Jadi, tanggung jawab anggaran itu tersebar di beberapa bagian, mulai dari Sekretariat, lalu ada bidang-bidang serta UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas). Masing-masing kepala bidang atau kepala unit inilah yang memegang kendali dan bertanggung jawab penuh atas penggunaan anggaran di bagiannya masing-masing sesuai dengan tugasnya.”(Jamri Murdani, Bendahara Pengeluaran).*

Selain mengelola biaya, Dinas Perhubungan juga menjalankan fungsi sebagai Pusat Pendapatan melalui retribusi parkir. Untuk pengelolaan pendapatan ini dijelaskan secara mendalam oleh Ibu Yustia, beliau menjelaskan bahwa :

*“Pendapatan pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih bersumber dari retribusi perpajakan yang dikelola melalui 123 titik parkir. Pengelolaannya dilakukan oleh UPTD Perpajakan, di mana seluruh pendapatan disetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setiap harinya dengan target sebesar Rp2.434.000 per hari. Jadi, berhubung Dinas Perhubungan ini bukan merupakan badan usaha yang mencari laba, maka seluruh pendapatan itu disetorkan secara utuh tanpa ada sistem pembagian persentase pendapatan untuk instansi.” (Yustia Ningrum, Kepala Subbagian Keuangan).*

Hal ini kemudian dipertegas oleh Ibu Nia Sastiana yang menyatakan bahwa tidak ada klasifikasi pusat laba maupun investasi di instansi ini:

*“Di dinas ini hanya ada pusat biaya dan pusat pendapatan saja. Kami tidak memiliki pusat laba atau pusat investasi, karena kami bukan perusahaan*

*yang mencari profit. Fokus kami adalah mengelola anggaran dari APBD untuk pelayanan dan menyetorkan pendapatan retribusi langsung ke kas daerah.”* (Nia Sastiana, staf atau pegawai subbagian Perencanaan dan Evaluasi).

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai pusat pertanggung jawaban, Dinas Perhubungan Kota Prabumulih telah menerapkan konsep pusat pertanggungjawaban secara terstruktur melalui pembagian wewenang yang jelas sesuai dengan yang ada dalam struktur organisasi. Setiap bidang dan unit kerja yang ada pada dinas memiliki tugas utama untuk mengelola dana untuk pelayanan masyarakat, jadi mereka disebut sebagai pusat biaya. Selain sebagai pusat biaya, Dinas Perhubungan juga menjalankan fungsi sebagai pusat pendapatan, khususnya dalam retribusi perpajakan. Realisasi anggaran pendapatan retribusi Dinas Perhubungan Kota Prabumulih pada tahun 2024 sebesar Rp 774.255.000, yang dimana pendapatan ini bersumber dari 123 titik parkir yang tersebar di Kota Prabumulih di bawah pengelolaan UPTD Perpajakan.

Setiap pendapatan yang terkumpul dicatat dan wajib disetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setiap harinya dengan target harian sebesar Rp2.434.000. Adapun anggaran pendapatan Dinas Perhubungan Kota Prabumulih pada tahun 2024 ini, penting untuk dicatat bahwa tidak terdapat sistem bagi hasil atau pembagian persentase pendapatan untuk pihak dinas, karena status instansi ini adalah lembaga pelayanan publik dan bukan badan usaha yang berorientasi pada keuntungan. Perlu diketahui bahwa pada Dinas Perhubungan ini tidak terdapat pusat laba maupun pusat investasi. Hal ini dikarenakan dinas bukan merupakan badan usaha yang bertujuan mencari keuntungan atau mengelola modal untuk investasi jangka panjang, melainkan murni instansi pemerintah yang menjalankan tugas pelayanan publik.

#### **4.3 Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **4.3.1 Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih**

Setelah memaparkan berbagai temuan data melalui observasi dan wawancara yang ada pada bagian sebelumnya, bagian ini akan membahas lebih

mendalam mengenai bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih. Analisis ini bertujuan untuk membandingkan antara teori akuntansi pertanggungjawaban dengan praktik nyata di lapangan, guna melihat sejauh mana pembagian wewenang dan pengelolaan anggaran yang dilakukan mampu menciptakan sistem kerja yang efisien dan akuntabel. Dibawah ini merupakan pembahasan mendalam mengenai syarat/unsur utama dari akuntansi pertanggungjawaban dan penerapannya pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih :

### 1. Struktur Organisasi

Dari penjelasan sebelumnya, struktur organisasi pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih sudah menggambarkan aliran tanggung jawab, menetapkan pembagian tugas dan wewenang yang jelas, serta telah diatur secara resmi melalui Peraturan Wali Kota Prabumulih Nomor 41 Tahun 2025 serta SK PPTK. Alur kerja pada Dinas Perhubungan juga dilakukan sesuai tingkatan, di mana instruksi bergerak dari tingkat atasan ke tingkat bawahan, sementara pelaporan pertanggungjawabannya mengalir dari tingkat paling bawah ke tingkat atas.

Meskipun masih terdapat kendala terkait penempatan staf/pegawai yang belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, namun Dinas Perhubungan ini dapat mengatasinya melalui proses adaptasi secara mandiri serta melalui program pelatihan atau diklat. Selain itu, setiap Kepala Bidang yang menduduki jabatan Eselon III dan IV diberikan wewenang penuh untuk melaksanakan kegiatan dan menjalankan program kerja pada bidang dan unit masing-masing. Jadi secara keseluruhan, struktur organisasi ini telah berfungsi dengan baik dan jelas dalam mendukung kelancaran operasional kerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

### 2. Anggaran

Sistem anggaran pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih juga telah berfungsi dengan sangat baik sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Hal ini terlihat dari proses penyusunan anggaran yang bersifat partisipatif, di mana setiap unit kerja dilibatkan langsung untuk menyampaikan kebutuhan nyata

mereka melalui Rencana Kerja (Renja). Cara ini sangat efektif karena setiap kepala bidang dan unit kerja menjadi lebih bertanggung jawab terhadap anggaran yang mereka usulkan. Selain itu, anggaran yang disusun juga dipastikan searah dengan program kerja Wali Kota agar tepat sasaran.

Selain itu, pengelolaan anggaran ini mencakup tahapan yang komprehensif dalam jangka waktu satu tahun, mulai dari perencanaan hingga tahap pelaporan dan evaluasi. Penegasan mengenai pembagian tanggung jawab pada setiap program kerja menunjukkan adanya upaya untuk mencapai target instansi secara efektif dan transparan. Selain itu, DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) juga digunakan sebagai acuan utama dalam mengontrol biaya, guna untuk memastikan setiap pengeluaran tetap berada dalam batas plafon agar tidak terjadi pemborosan (*over-budget*).

### 3. Penggolongan biaya

Penggolongan biaya pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih dalam aktivitas operasionalnya itu telah ada biaya yang mungkin dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Namun, dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan, biaya tersebut belum diklasifikasikan secara spesifik ke dalam kategori biaya terkendali dan tidak terkendali, melainkan masih digabungkan dalam satu laporan penggolongan standar secara umum berdasarkan jenis belanja, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal peralatan dan mesin. Dengan demikian, penggolongan biaya terkendali dan tidak terkendali pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih ini belum diterapkan secara resmi dalam pembukuan dan pelaporannya. Karena dalam pencatatannya belum dipisah secara spesifik antara biaya terkendali dan tidak terkendali.

### 4. Pengklasifikasian kode rekening

Pengklasifikasian kode rekening pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih telah diterapkan secara sistematis. Penggunaan kode rekening ini telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan disusun berdasarkan pedoman resmi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah. Penerapan kode rekening yang berbeda untuk setiap

program bertujuan agar setiap pengeluaran tercatat secara akurat, sekaligus mempermudah proses pengawasan sehingga tidak tertukar. Penerapan ini dapat memastikan setiap penggunaan dana terpantau dengan jelas sehingga seluruh program kerja dapat terlaksana serta dapat memberikan hasil yang nyata.

#### 5. Laporan Pertanggungjawaban

Sistem pelaporan pertanggungjawaban pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih telah diterapkan secara sistematis menggunakan aplikasi SIPD. Setiap pimpinan di unit kerja, mulai dari Kepala Bidang hingga Kepala UPTD, telah memenuhi kewajibannya dalam melaporkan setiap biaya yang digunakan. Penggunaan aplikasi SIPD dapat memudahkan proses rekapitulasi data menjadi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) secara otomatis dan akurat. Hal ini memudahkan pimpinan untuk melihat secara langsung berapa besar anggaran yang sudah terpakai dan bagaimana persentase pencapaian kerja di masing-masing bidang.

Adanya laporan ini sangat penting karena berfungsi sebagai alat pengendalian biaya agar tidak terjadi pemborosan. Dengan laporan yang terperinci, pimpinan bisa lebih mudah mengawasi pengeluaran dan memastikan semua dana digunakan sesuai dengan rencana. Secara keseluruhan, sistem pelaporan ini tidak hanya sekadar memenuhi urusan administrasi, tetapi juga membantu pimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan syarat kelima dari akuntansi pertanggungjawaban di instansi ini sudah berjalan dengan baik.

Selain lima syarat/unsur utama dari akuntansi pertanggungjawaban, Dinas Perhubungan Kota Prabumulih juga telah membentuk pusat-pusat pertanggungjawaban. Secara teoritis, pusat pertanggungjawaban diklasifikasikan menjadi pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Namun, dalam praktiknya pada instansi pemerintahan ini, pusat-pusat tersebut terbagi menjadi pusat biaya dan pusat pendapatan. Hal ini sejalan dengan temuan dari hasil penelitian bahwa setiap bidang dan unit kerja diklasifikasikan sebagai pusat biaya, karena fokus utama kegiatan adalah mengelola anggaran dari APBD untuk membiayai program kegiatan di sektor transportasi perhubungan.

Selain itu, instansi juga menjadi pusat pendapatan melalui pengelolaan retribusi perparkiran yang dikelola oleh UPTD Perparkiran dan seluruh penerimaannya disetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah setiap hari. Pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih tidak ditemukan pusat laba dan pusat investasi. Hal ini karena instansi tidak berorientasi pada keuntungan atau pengelolaan modal untuk kepentingan investasi jangka panjang, melainkan berfungsi untuk memberikan pelayanan publik secara efektif.

#### **4.3.2 Peran Dan Evaluasi Anggaran Sebagai Bentuk Pengendalian Biaya Pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih**

Anggaran dianggap sebagai alat penting dalam perencanaan, pengendalian dan koordinasi yang efektif dalam sebuah organisasi. Anggaran merupakan suatu rencana tertulis dari keseluruhan aktivitas organisasi yang dinyatakan dalam satuan angka pada periode tertentu yang dibuat secara sistematis dan formal. Anggaran diperlukan karena organisasi sering menghadapi ketidakpastian pada masa yang akan datang, sehingga anggaran akan mengarahkan untuk mencapai tujuan sasaran yang ditetapkan organisasi (Kholmi, 2019).

Hal ini dibuktikan dari wawancara dengan Bapak Jamri mengenai peran anggaran sebagai bentuk pengendalian biaya:

*“Adanya anggaran berperan sebagai bentuk pengendalian biaya karena membandingkan rencana anggaran dengan realisasi pengeluaran secara nyata. Sehingga, pimpinan dapat mendeteksi penyimpangan atau pemborosan di setiap unit kerja secara cepat. Untuk melihat efisiensi dari pengendalian biaya, kita membandingkan besaran anggaran yang digunakan atau dikeluarkan dengan anggaran yang ditetapkan di awal. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai sejauh mana anggaran yang telah disusun ini dapat dicapai atau terlaksana dengan baik atau belum.”* (Murdani, Bendahara Pengeluaran).

Adapun evaluasi dari Ibu Yustia mengenai penggunaan anggaran agar tidak terjadi pemborosan, beliau menyatakan bahwa:

*“Kami mengendalikan biaya dengan memantau laporan realisasi setiap bulan untuk memastikan pengeluaran sebanding dengan kemajuan program di lapangan. Jika ditemukan serapan yang tidak wajar, kami segera melakukan*

*evaluasi agar anggaran tetap tepat sasaran dan terhindar dari penyimpangan. Selain itu, jika terjadi selisih atau varians harga, dana tersebut akan dikembalikan ke kas daerah atau dicatat sebagai SILPA. Dalam setiap langkah koreksi, kami selalu berpedoman pada Peraturan Wali Kota (Perwako) mengenai Standar Satuan Harga (SSH) yang berlaku guna menjamin setiap pengeluaran tetap akurat dan sesuai ketetapan pemerintah.” (Yustia Ningrum, Kepala Subbagian Keuangan).*

Selanjutnya evaluasi dari Ibu Nia mengenai penggunaan aplikasi sebagai alat evaluasi yaitu:

*“Iya, di sini pasti kita lakukan evaluasi untuk melihat efisiensi penggunaan dan pengendalian dari biaya atau anggaran yang digunakan. Kami mengevaluasinya dengan menggunakan aplikasi (SIMONEV) Sistem Monitoring dan Evaluasi.” (Nia Sastiana, staf atau pegawai subbagian Perencanaan dan Evaluasi).*

Berdasarkan uraian di atas, Dinas Perhubungan Kota Prabumulih telah menjadikan anggaran sebagai instrumen pengendalian biaya yang efektif melalui sistem pemantauan yang ketat. Kerja sama antara pengawasan langsung lewat laporan bulanan dan penggunaan aplikasi SIMONEV (Sistem Monitoring dan Evaluasi) dapat memudahkan pimpinan untuk menemukan kesalahan sejak awal. Dengan mengikuti aturan standar satuan harga (SSH), setiap selisih anggaran dapat dikelola secara terbuka. Hal ini membuat penggunaan dana di instansi menjadi akurat, dan dapat dipercaya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa Dinas Perhubungan Kota Prabumulih sebagian besar telah menerapkan lima syarat/unsur utama dari akuntansi pertanggungjawaban. Hal ini dibuktikan dengan adanya aliran tanggung jawab dari struktur organisasi yang jelas sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2025. Penyusunan anggaran dilakukan secara partisipatif. Klasifikasi kode rekening yang terintegrasi dengan sistem SIPD berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Serta laporan pertanggungjawaban yang diterapkan dengan sangat optimal melalui digitalisasi sistem SIPD dalam bentuk LRA. Namun, terkait penggolongan biaya antara biaya terkendali dan biaya tidak terkendali, instansi ini belum memisahkannya secara spesifik dalam sistem pencatatan dan pelaporannya.

Penerapan ini juga didukung oleh pusat pertanggungjawaban seperti pusat biaya, karena fokus utama instansi ini adalah mengelola anggaran dari APBD untuk membiayai program kegiatan di sektor transportasi perhubungan. Optimalisasi anggaran sebagai bentuk pengendalian biaya juga telah dilakukan dengan baik melalui pemantauan sistematis dan evaluasi berbasis aplikasi SIMONEV. Integrasi struktur organisasi yang baik dan pengawasan ketat terbukti dapat meminimalkan penyimpangan, terlihat dari peningkatan signifikan penyerapan anggaran dari 84,56% tahun 2023 menjadi 96,26% tahun 2024. Keberhasilan ini didorong oleh peralihan penuh ke aplikasi SIPD yang mendukung pengawasan secara *real-time* dan pelaporan otomatis yang meningkatkan akurasi data keuangan pada instansi.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat. Saran yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

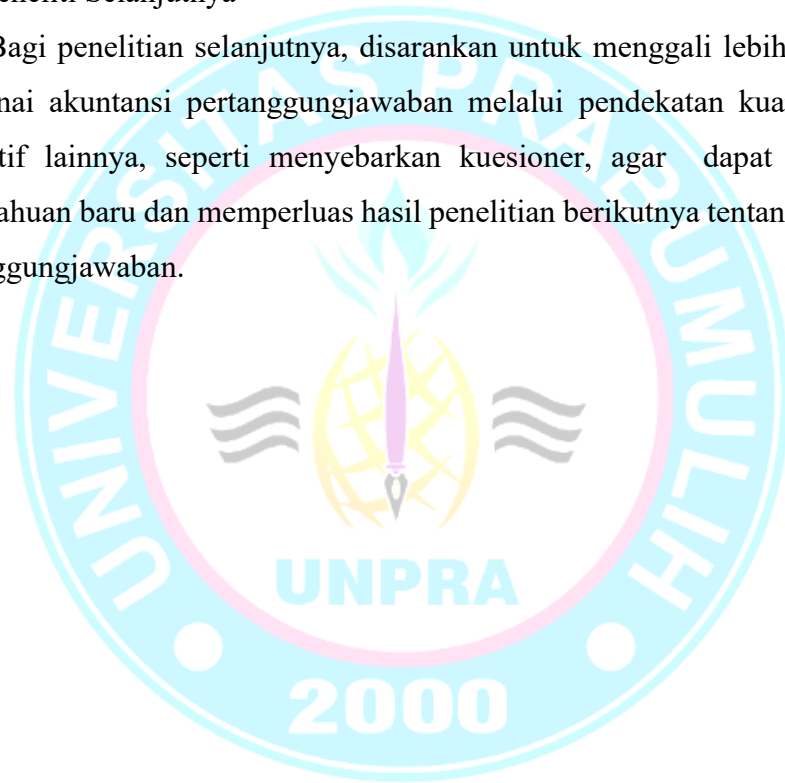
1. Bagi Instansi

Terkait penyempurnaan penggolongan biaya, disarankan agar bagian keuangan mulai mempertimbangkan pemisahan antara biaya terkendali dan tidak terkendali dalam pencatatan dan pelaporan, guna mengevaluasi kinerja

pimpinan setiap bidang dan unit kerja agar lebih objektif. Mengingat masih adanya penempatan staf yang belum sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, instansi disarankan untuk terus konsisten melakukan program pelatihan (diklat) secara berkala, terutama yang berkaitan dengan pengoperasian sistem SIPD agar proses pelaporan semakin akurat dan relevan. Serta disarankan agar instansi terus mengoptimalkan penggunaan fitur-fitur dalam aplikasi SIPD untuk menjaga konsistensi, transparansi, dan akurasi data dalam setiap tahap perencanaan hingga pelaporan.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggali lebih mendalam mengenai akuntansi pertanggungjawaban melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif lainnya, seperti menyebarkan kuesioner, agar dapat menambah pengetahuan baru dan memperluas hasil penelitian berikutnya tentang akuntansi pertanggungjawaban.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, *et al.* (2024) *Akuntansi Mnajemen*. PT. Penamuda Media.
- Arianti, B.F. (2025). *Akuntansi Manajemen Konsep dan Latihan Soal*. PT. Pena Persada Kerta Utama.
- Bawang, R.M., Herdi, H., & Rangga, Y.D.P. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggung jawaban Dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada Pintar Asia Swalayan Maumere. *Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(3): 123–133.
- Betrianana, M., Adelina, C., & Alkahfi, B.D. (2022). *Akuntansi Manajemen Konsep dan Dasar Dalam Pengambilan Keputusan*. CV. Amanah.
- Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kholmi, M. (2019). *Akuntansi Manajemen*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Labangu, Y.L., Arifuddin, & Asmawati. (2023) Penerapan Akuntansi Pertanggung jawaban Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada PT. Pegadaian Cabang Kendari. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(1): 272-283.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Semester I Tahun. (2023). Diakses dari <https://www.bpk.go.id>.
- Mendrofa, F. A. M., & Susilowati, K. (2024). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. PT. Penerbit Penamuda Media.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan*. JDIH Kementerian Keuangan. Diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/f0614335-ba08-4b1d-b925-08e710c3cc76/2023pmkeuangan062.pdf>
- Mukin, A.M., Dince, M.N., & Dilliana, S.M. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Dana Bantuan Sosial Pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sikka. *Jurnal Accounting UNIPA*, 2(1): 155-165.
- Narsa, I. Made. (2023). *Akuntansi Manajemen*. Universitas Terbuka.
- Nursanty, *et al.* (2022). *Akuntansi Manajemen*. Seval Literindo Kreasi.

- Prakoso, Teguh. (2024). *Strategi Pengendalian Biaya Dalam Pengelolaan*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Purwanti, Ari. (2023). *Akuntansi Manajemen*. Salemba Humanika.
- Rahmadani, Ida. (2024). *Akuntansi Manajemen dan Penganggaran Perusahaan*. Media Ilmu.
- Santoso *et al.* (2023). *Akuntansi Manajemen*. Eureka Media aksara.
- Sharon, E., & Mintalangi, S. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggung jawaban Dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Pln) Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara. *Jurnal EMBA (Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi)*, 9(1): 1046-1057.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2025). *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah dipahami*. Pustaka Baru Press.
- Torina, E. G., Susanti, N., & Hidayah, N. R. (2022). Penerapan Akuntansi Pertanggung jawaban dengan Anggaran Sebagai Pengendalian Biaya pada Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu. *Jurnal EKOMBIS (Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis)*, 10(S1):89–98.
- Walikota Prabumulih. (2025). *Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 41 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Prabumulih*. Prabumulih: JDIH Kota Prabumulih.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Kartu Bimbingan



#### UNIVERSITAS PRABUMULIH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

##### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI

**NAMA MAHASISWA** : Rosalia Septiasari  
**NIM** : 2022120025  
**JUDUL SKRIPSI** : Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Anggaran Sebagai Bentuk Pengendalian Biaya Pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih  
**DOSEN PEMBIMBING I** : Meirani Betriana, S.E., M.Si.

| Tanggal    | Pembahasan | Komentar                              | Tanda Tangan | Ket |
|------------|------------|---------------------------------------|--------------|-----|
| 06-11-2025 | BAB I      | - pertanai ini latar belakang         |              |     |
| 11-11-2025 | BAB I      | - penoreta & batasan masalah          |              |     |
| 18-11-2025 | BAB I      | ACC lanjut BAB II                     |              |     |
| 01-11-2025 | BAB II     | - rapormi baru gunan dalam            |              |     |
|            |            | - kerangka pemikiran                  |              |     |
| 24-11-2025 | BAB II     | ACC lanjut BAB III                    |              |     |
| 07-12-2025 | BAB III    | Pertanai kerangka ke BAB III          |              |     |
| 01-12-2025 | BAB III    | - populasi, sampel, dan teknik sampel |              |     |
| 02-12-2025 | BAB III    | ACC lanjut persan Sempura             |              |     |
| 03/01/2026 | BAB IV     | - tesand persan                       |              |     |
|            |            | - Hasil persan persan                 |              |     |
|            |            | - persan persan & persan persan       |              |     |
| 25/02/2026 | BAB IV     | - persan ut persan persan             |              |     |
|            |            | Hasil persan                          |              |     |
|            |            | ACC lanjut BAB V                      |              |     |
| 02/03/2026 | BAB V      | - li kerangka persan & persan         |              |     |
| 03/03/2026 | BAB V      | - persan persan persan persan         |              |     |
| 10/03/2026 | BAB V      | ACC lanjut persan persan              |              |     |

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis

Dr. Hj. Desliana, S.E., M.M.  
 NUPK 02544740641230233

Dosen Pembimbing I

Meirani Betriana, S.E., M.Si.  
 NUPK. 0837761662231272

Jalan Patra No.50 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan  
 Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, Indonesia Telepon (0713)3224417 Faximile (0713) 322418  
 e-mail: [mail@unpra.ac.id](mailto:mail@unpra.ac.id)



**UNIVERSITAS PRABUMULIH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**  
**MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**NAMA MAHASISWA** : Rosalia Septiasari  
**NIM** : 2022120025  
**JUDUL SKRIPSI** : Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Anggaran  
 Sebagai Bentuk Pengendalian Biaya Pada Dinas Perhubungan  
 Kota Prabumulih  
**DOSEN PEMBIMBING II** : Emi Sukmawati S.E., M.Si.

| Tanggal    | Pembahasan | Komentar                                                                                                                                      | Tanda Tangan | Ket |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| 12-11-2025 | Bab I      | Perbaiki :<br>- Penulisan , paragraf<br>- Kutipan<br>- Judul tabel<br>- Perbaiki narasi hal 3<br>- Buat batasan penelitian & perbaiki isinya. | <i>Emi</i>   |     |
| 13-11-2025 | Bab I      | Bab I Acc<br>Lanjutkan Bab II                                                                                                                 | <i>Emi</i>   |     |
| 20-11-2025 | Bab II     | Bab II Acc<br>Lanjut Bab III                                                                                                                  | <i>Emi</i>   |     |

**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis**



Dr. Hj. Desiana, S.P., M.M.  
 NUPTK. 2544740641230233

**Dosen Pembimbing II**

*Emi*

Emi Sukmawati S.E., M.Si.  
 NUPTK. 2053750651230140

Jalan Patra No.50 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan  
 Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, Indonesia Telepon (0713)3224417 Faximile (0713) 322418  
 e-mail: [mail@unpra.ac.id](mailto:mail@unpra.ac.id)



**UNIVERSITAS PRABUMULIH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**  
**MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**NAMA MAHASISWA** : Rosalia Septiasari  
**NIM** : 2022120025  
**JUDUL SKRIPSI** : Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Anggaran  
 Sebagai Bentuk Pengendalian Biaya Pada Dinas Perhubungan  
 Kota Prabumulih  
**DOSEN PEMBIMBING II** : Emi Sukmawati S.E., M.Si.

| Tanggal    | Pembahasan | Komentar                                                            | Tanda Tangan | Ket |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| 27-11-2025 | Bab III    | Perbaiki populasi & sampel.<br>tambahkan alasan purposive sampling. | Emi          |     |
| 1-12-2025  | Bab III    | Bab III Acc<br>Persiapkan diri u/ seminar dan lengkapi skripsi.     | Emi          |     |

**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis**



Dr. H. Desliana S.E., M.M.  
NUPK. 2544740641230233

**Dosen Pembimbing II**

Emi Sukmawati S.E., M.Si.  
NUPTK. 2053750651230140

Jalan Patra No.50 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan  
 Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, Indonesia Telepon (0713)3224417 Faximile (0713) 322418  
 e-mail: [mail@unpra.ac.id](mailto:mail@unpra.ac.id)



**UNIVERSITAS PRABUMULIH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**  
**MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**NAMA MAHASISWA** : Rosalia Septiasari  
**NIM** : 2022120025  
**JUDUL SKRIPSI** : Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Anggaran Sebagai Bentuk Pengendalian Biaya Pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih  
**DOSEN PEMBIMBING II** : Emi Sukmawati, S.E., M.Si

| Tanggal   | Pembahasan    | Komentar                                                                   | Tanda Tangan | Ket |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| 10-2-2024 | Bab <u>IV</u> | - Pembagian tugas di kelas<br>- Pembahasan sesuai dg indikator yg dipakai. |              |     |
| 13-2-2024 | Bab <u>IV</u> | Bab <u>IV</u> Acc<br>lanjut Bab <u>V</u>                                   |              |     |
| 3-3-2024  | Bab <u>V</u>  | Bab <u>V</u> Acc<br>lengkapi skripsi & siapakan diri<br>y/ tempore.        |              |     |

**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis**



Dr. H. Desliana, S.E., M.M  
 NUPTK. 2544740641230233

**Dosen Pembimbing II**

Emi Sukmawati, S.E., M.Si  
 NUPTK. 2053750651230140

Jalan Patra No.50 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan  
 Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, Indonesia Telepon (0713)3224417 Faximile (0713) 322418  
 e-mail: [mail@unpra.ac.id](mailto:mail@unpra.ac.id)

## Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



### UNIVERSITAS PRABUMULIH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Prabumulih, 05 November 2025

Nomor : 010/AKT /FEB/ UNPRA/XI/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Izin Observasi

Kepada Yth. Walikota Prabumulih  
c.q. Dinas Perhubungan Kota Prabumulih  
di

Tempat

Berdasarkan kurikulum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi bahwa mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah diwajibkan untuk membuat Skripsi. Maka kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan izin Observasi kepada mahasiswa dibawah ini :

|               |                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama          | : Rosalia Septiasari                                                                                                                |
| NIM           | : 2022120025                                                                                                                        |
| Program Studi | : Akuntansi                                                                                                                         |
| Judul Skripsi | : Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Anggaran Sebagai Bentuk Pengendalian Biaya pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih |

Untuk melaksanakan penelitian sebagai bahan Skripsi di Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin. Dan mohon kiranya agar Bapak/Ibu dapat membantu untuk memberikan izin Observasi.

Demikianlah surat permohonan penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Ketua Prodi Akuntansi  
  
Atmawijaya, S.E., M.Si.  


Jalan Patra No.50 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan  
Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, Indonesia Telepon (0713)3224417 Faximile (0713) 322418  
e-mail: [mail@unpra.ac.id](mailto:mail@unpra.ac.id)



**PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Lingkar Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan  
 Website: [www.kotaprabumulih.go.id](http://www.kotaprabumulih.go.id) E-mail: [dishubprabumulih@gmail.com](mailto:dishubprabumulih@gmail.com)

Prabumulih, 07 November 2025

Nomor : 800/ S64 / Dishub.I/ 2025  
 Sifat : Biasa  
 Lamp : -  
 Perihal : Persetujuan Observasi

Yth. Ketua Program Studi Akutansi  
 di  
 Prabumulih

Menindaklanjuti surat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabumulih Nomor : 010/AKT/FEB/UNPRA/XI/2025 tanggal 05 November 2025 perihal Surat Izin Observasi.

Untuk itu kami memberikan izin kepada mahasiswa Universitas Prabumulih tersebut di bawah ini :

Nama : Rosalia Septiasari  
 NIM : 2022120025  
 Program Studi : Akutansi  
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akutansi Pertanggungjawaban Anggaran Sebagai Bentuk Pengendalian Biaya Pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih

untuk melakukan observasi di Dinas Perhubungan Kota Prabumulih dengan catatan Mahasiswa/ Mahasiswi tersebut bersedia mematuhi peraturan yang berlaku di Dinas Perhubungan Kota Prabumulih.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Perhubungan  
 Kota Prabumulih,



**Arlus, S.Pd**  
 Penata Tingkat I/ III.d  
 NIP. 197305181998031004

### Lampiran 3. Transkrip Wawancara



#### UNIVERSITAS PRABUMULIH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

---

#### TRANSKIP WAWANCARA DENGAN Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH

**NARASUMBER : ARLUS. S. Pd**

1. Apakah Dinas Perhubungan Kota Prabumulih sudah memiliki struktur organisasi yang menggambarkan aliran tanggung jawab, wewenang dan posisi yang jelas untuk setiap sub bagiannya?

Kalau di Dinas Perhubungan ini memang sudah mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan aliran tanggung jawab dan posisi yang jelas. Aliran penumpahan tanggung jawab bergerak dari tingkat atas ke tingkat paling bawah seperti pemberian instruksi, tugas, dan wewenang. Sedangkan, untuk aliran pertanggungjawabannya mengalir dari tingkat bawah ke atas seperti pelaporan pertanggungjawabannya.

2. Bagaimana jika dalam penempatan staf atau pegawai dalam posisi jabatan tertentu tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki?

Terkait penempatan staf atau pegawai itu, sebenarnya ada yang tidak sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki, namun mereka akan belajar menyesuaikan diri dan mengikuti pelatihan serta diklat sesuai dengan jabatan yang mereka dapat.

3. Bagaimana Bapak mendelegasikan wewenang pengelolaan anggaran kepada tiap-tiap kepala bidang dan UPTD yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih ?

Selain itu, pendelegasian wewenang dilakukan melalui pembagian tugas kepada kepala bidang masing-masing, terutama untuk yang menduduki jabatan Eselon III dan IV seperti sekretaris, kepala bidang (kabid), dan kepala UPTD, yang ada dalam struktur organisasi, dan itu sudah tertuang dalam SK PPTK (Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan). Setiap kepala bidang memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatan dan menjalankan program kerja sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

---

Jalan Patra No.50 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan  
Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, Indonesia Telepon (0713)322441 7 Faximile (0713) 322418  
e-mail: [mail@unpra.ac.id](mailto:mail@unpra.ac.id)



**UNIVERSITAS PRABUMULIH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

---

4. Pusat pertanggungjawaban apa saja yang terdapat dalam Dinas Perhubungan Kota Prabumulih ?

Kalau terkait dengan pusat pertanggungjawaban, sebenarnya hampir setiap organisasi atau dinas di pemerintahan daerah itu merupakan pusat biaya, karena kami semua bertanggungjawab untuk mengelola biaya. Dishub juga termasuk ke dalam pusat biaya. Tapi, selain pusat biaya, Dishub juga menjadi salah satu dari pusat pendapatan melalui pemungutan retribusi perparkiran. Jadi, untuk pusat pertanggungjawaban yang ada di sini adalah pusat biaya dan juga pusat pendapatan.

Prabumulih, 19 Januari 2026  
Plt. Kepala Dinas Perhubungan  
Kota Prabumulih



Arlus, S.Pd  
NIP. 197305181998031004



**UNIVERSITAS PRABUMULIH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

---

**TRANSKIP WAWANCARA DENGAN  
SUB BAGIAN KEUANGAN  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH**

**NARASUMBER: YUSTIA NINGRUM. S.E**

**1. Bagaimana pengelolaan anggaran dalam Dinas Perhubungan Kota Prabumulih ?**

Pengelolaan anggaran pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih dilakukan dalam beberapa tahapan untuk jangka waktu satu tahun. Proses ini dimulai dari perencanaan dan penyusunan anggaran untuk setiap program, kegiatan, serta proyek yang telah ditentukan, hingga masuk ke tahap pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi penggunaan anggaran. Dalam proses penyusunannya itu sudah ditetapkan siapa yang bertanggungjawab untuk setiap program kegiatan guna memastikan seluruh target instansi dapat tercapai secara efektif.

**2. Apakah Dinas Perhubungan Kota Prabumulih telah melakukan pemisahan antara biaya terkendali dan tidak terkendali ?**

Berkenaan dengan biaya terkendali dan biaya tidak terkendali, itu kami di dinas tentunya ada biaya-biaya yang dimaksud. Hanya saja, dalam pencatatan dan proses pelaporannya itu belum digolongkan secara spesifik. Biaya di sini hanya digolongkan berdasarkan jenis belanja seperti belanja pegawai, belanja barang atau jasa, dan belanja modal peralatan dan mesin..

**3. Apakah dalam laporan pertanggungjawaban sudah menggunakan kode rekening ?**

Penggunaan kode rekening sudah dilakukan. Semua anggaran sudah diberi kode rekening sesuai dengan yang ada dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Setiap pengeluaran memiliki kode angka tersendiri agar tidak tertukar antara program yang satu dengan yang lain, serta mempermudah kami dalam memantau penggunaan anggaran di setiap bidangnya.



**UNIVERSITAS PRABUMULIH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

---

4. Apakah setiap unit kerja telah membuat laporan pertanggungjawaban anggaran berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan? Apakah dengan adanya laporan pertanggungjawaban anggaran dapat digunakan sebagai alat/bentuk pengendalian biaya ?

Iya, pasti ada laporan pertanggungjawaban. Prosesnya dimulai dari bukti kuitansi pembayaran yang diinput ke dalam sistem, kemudian secara otomatis tercatat dalam Buku Kas Umum (BKU) dan menjadi laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fungsional. Sistem ini juga dapat diakses oleh pemerintah pusat. Setiap kegiatan operasional di dinas ini juga dapat dipantau langsung melalui sistem. Dan melalui laporan pertanggungjawaban ini, anggaran dapat digunakan sebagai alat serta bentuk pengendalian biaya dalam pengelolaan anggaran. Karena, laporan pertanggungjawaban dapat memberikan informasi tentang penggunaan anggaran dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

5. Perbaikan apa yang dilakukan dalam sistem pertanggungjawaban sehingga penyerapan anggaran meningkat secara signifikan pada tahun 2024?

Peningkatannya karena perbaikan koordinasi dan pemantauan anggaran yang lebih ketat setiap bulan. Nah untuk penyerapan yang mencapai 96,26% di tahun 2024 karena pada tahun itu kami sudah beralih sepenuhnya ke aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Perbaikan utamanya terletak pada integrasi data, dulu prosesnya ini masih manual dan terpisah-pisah. Sekarang, dari perencanaan sampai pelaporan, semuanya satu pintu secara real-time. Pimpinan juga bisa memantau serapan harian secara digital, jadi kalau ada kegiatan yang melambat, bisa langsung ditegur dan dipercepat. Intinya, SIPD membuat koordinasi antarbidang agar lebih sinkron dan pengawasan anggaran jauh lebih ketat dibandingkan tahun sebelumnya.

6. Bagaimana cara pengelolaan pendapatan yang ada dalam Dinas Perhubungan melalui retribusi parkir ?



**UNIVERSITAS PRABUMULIH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

---

Pendapatan pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih bersumber dari retribusi parkir yang dikelola melalui 123 titik parkir. Pengelolaannya dilakukan oleh UPTD Perparkiran, yang di mana seluruh pendapatan disetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setiap harinya dengan target sebesar Rp2.434.000 per hari. Jadi, berhubung Dinas Perhubungan ini bukan merupakan badan usaha yang mencari laba, maka seluruh pendapatan itu disetorkan secara utuh tanpa ada sistem pembagian persentase pendapatan untuk instansi.

7. Bagaimana Ibu menggunakan anggaran tersebut sebagai alat pengendalian agar tidak terjadi pemborosan/penyimpangan dalam setiap program kerja? Jika terjadi selisih (varians) antara realisasi dan anggaran, langkah koreksi apa yang akan dilakukan untuk mengatasinya ?

Kami mengendalikan biaya dengan memantau laporan realisasi setiap bulan untuk memastikan pengeluaran sebanding dengan kemajuan program di lapangan. Jika ditemukan serapan yang tidak wajar, kami segera melakukan evaluasi agar anggaran tetap tepat sasaran dan terhindar dari penyimpangan. Selain itu, jika terjadi selisih atau varians harga, dana tersebut akan dikembalikan ke kas daerah atau dicatat sebagai SILPA. Dalam setiap langkah koreksi, kami selalu berpedoman pada Peraturan Walikota (Perwako) mengenai Standar Satuan Harga (SSH) yang berlaku guna menjamin setiap pengeluaran tetap akurat dan sesuai ketentuan pemerintah.

Prabumulih, 03 Februari 2026

Kepala Sub Bidang Keuangan

  
 Yustia Ningrum, S.E.  
 NIP. 19830620 2006 042021



**UNIVERSITAS PRABUMULIH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

---

**TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN  
BENDAHARA PENGELUARAN  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH**

**NARASUMBER: JAMRI MURDANI S. KOM**

1. Apakah penetapan tugas dan tanggungjawab dalam Dinas Perhubungan sudah berjalan dengan baik ?

Penetapan tugas dan tanggung jawab pada Dinas Perhubungan ini sudah berjalan secara optimal dan bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan struktur organisasi yang ada, sehingga operasional kerja dapat tercapai sesuai rencana.

2. Bagaimana pengelolaan anggaran dalam Dinas Perhubungan Kota Prabumulih ?

Pengelolaan anggaran di Dinas Perhubungan dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), yang bertujuan untuk memperkuat program-program kerja walikota. Kemudian, anggaran yang diberikan itu sesuai dengan rencana program kerja dari masing-masing bidang yang ada dalam dinas. Adapun anggaran yang diterima itu dapat berupa uang maupun barang yang digunakan untuk mendukung kelancaran administrasi dan operasional dinas.

3. Apakah Dinas Perhubungan Kota Prabumulih telah melakukan pemisahan antara biaya terkendali dan tidak terkendali ?

Sebenarnya dalam aktivitas operasional sehari-hari, kami ada saja biaya-biaya yang mungkin bisa kami kendalikan, seperti biaya bahan bakar kendaraan dinas, biaya pelatihan dan pengembangan pegawai, biaya pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor), biaya pemeliharaan kendaraan dinas, serta biaya gaji pegawai. Namun, ada juga biaya yang tidak dapat kami kendalikan seperti biaya kemitraan dengan pihak swasta, biaya pengadaan kendaraan baru, dan lain sebagainya.



**UNIVERSITAS PRABUMULIH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

---

4. Apakah dalam pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban, pelaporan biaya operasional dari masing-masing unit kerja telah menggunakan klasifikasi kode rekening ?

Mengenai pengklasifikasian kode rekening, tentunya kami di dinas ini sudah menggunakan klasifikasi kode rekening, karena itu sudah ada dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) langsung dan sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah.

5. Apakah setiap unit kerja telah membuat laporan pertanggungjawaban biaya berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan ?

Setiap bidang atau unit kerja pasti sudah membuat laporan pertanggungjawaban berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Laporan dari masing-masing unit ini kemudian dikumpulkan dan direkap menjadi satu laporan anggaran dinas. Proses rekapitulasi ini sekarang dilakukan secara otomatis melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Laporan yang dihasilkan berbentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang isinya mencantumkan jumlah anggaran awal, jumlah uang yang sudah terpakai atau terealisasi, serta persentase pencapaiannya.

6. Apakah dengan adanya anggaran dapat digunakan sebagai alat/bentuk pengendalian biaya? Apakah evaluasi anggaran dalam pengendalian biaya itu dilakukan dengan membandingkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan biaya yang dianggarkan ?

Adanya anggaran berperan sebagai bentuk pengendalian biaya karena membandingkan rencana anggaran dengan realisasi pengeluaran secara nyata. Sehingga, pimpinan dapat mendeteksi penyimpangan atau pemborosan di setiap unit kerja secara cepat. Untuk melihat efisien dari pengendalian biaya, maka kita membandingkan besar anggaran yang digunakan atau dikeluarkan dengan anggaran yang ditetapkan di awal. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai sejauh mana anggaran yang telah disusun ini dapat dicapai atau terlaksanakan dengan baik atau belum.



**UNIVERSITAS PRABUMULIH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

---

7. Perbaikan apa yang dilakukan dalam sistem pertanggungjawaban sehingga penyerapan anggaran meningkat signifikan di tahun 2024?

Perbaikan utama kami terletak pada penyerapan anggaran yang kini benar-benar dimaksimalkan sesuai dengan rencana kegiatan. Perbedaan lainnya juga ada pada sistem, kalau di tahun 2021-2023 itu kami masih memakai SIMDA yang prosesnya ini masih setengah sistem setengah manual. Sedangkan di tahun 2024 ini ada pembaruan aplikasi yaitu SIPD dari Kemendagri yang di mana aplikasi ini sudah dimaksimalkan fungsinya, mulai dari input data sampai laporan akhir sudah otomatis dan jauh lebih maksimal.

8. Pusat pertanggungjawaban apa saja yang terdapat dalam Dinas Perhubungan Kota Prabumulih, bagaimana cara pengelolaannya ?

Pusat pertanggungjawaban di Dinas Perhubungan ini kami bagi berdasarkan struktur organisasi yang ada. Semuanya masuk dalam kategori Pusat Biaya, karena fokus kami adalah pelayanan, bukan mencari laba. Jadi, tanggung jawab anggaran itu tersebar di beberapa bagian, mulai dari Sekretariat, lalu ada bidang-bidang serta UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas). Masing-masing kepala bidang atau kepala unit inilah yang memegang kendali dan bertanggung jawab penuh atas penggunaan anggaran di bagiannya masing-masing sesuai dengan tugasnya.

Prabumulih, 19 Januari 2026

Bendahara Pengeluaran



Jamri Murtani, S.Kom  
NIP. 198705232024211004



**UNIVERSITAS PRABUMULIH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

---

**TRANSKIP WAWANCARA DENGAN  
STAF BAGIAN PERENCANAAN & EVALUASI  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PRABUMULIH**

**NARASUMBER : NIA SASTIANA, A.Ma**

1. Bagaimana struktur organisasi dalam Dinas Perhubungan Kota Prabumulih? Apakah sudah sesuai mekanisme dalam pengangkatan jabatan ?

Terkait dengan pengangkatan jabatan yang terdapat dalam struktur organisasi, itu telah diatur oleh kebijakan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2025 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, yang dimana mekanismenya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Struktur organisasi yang ada juga menggambarkan pembagian wewenang, tugas dan tanggungjawab yang jelas.

2. Apakah setiap bidang atau unit kerja (UPTD) juga ikut serta dalam proses penyusunan anggaran ?

Penyusunan anggaran dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unit kerja agar sesuai dengan kebutuhan dinas dalam merealisasikan program yang telah ditetapkan. anggarannya di Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) agar tidak terjadi over-budget

3. Apakah setiap elemen-elemen dalam laporan pertanggungjawaban sudah diberi kode rekening?

Dalam pemberian kode rekening untuk setiap elemen-elemen dalam laporan pertanggungjawaban pastinya sudah diberi kode rekening atau kode akunnya masing-masing seperti, pendapatan, kemudian akun belanja dan lainnya itu semua punya kode rekening yang berbeda-beda.



**UNIVERSITAS PRABUMULIH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

---

4. Pusat pertanggungjawaban apa saja yang terdapat dalam Dinas Perhubungan Kota Prabumulih?

Di Dinas ini hanya ada pusat biaya dan pusat pendapatan saja. Kami tidak memiliki pusat laba atau pusat investasi, karena kami bukan perusahaan yang mencari profit. Fokus kami adalah mengelola anggaran dari APBD untuk pelayanan dan menyetorkan pendapatan retribusi langsung ke kas daerah.

5. Apakah dilakukan evaluasi terhadap anggaran dalam hal pengendalian biaya pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih ?

Iya, disini pasti kita lakukan evaluasi untuk melihat efisiensi penggunaan dan pengendalian dari biaya atau anggaran yang digunakan. Kami mengevaluasinya dengan menggunakan aplikasi (SIMONEV) Sistem Monitoring dan evaluasi.

Prabumulih, 19 Januari 2026  
Staf Bagian Perencanaan  
Dan Evaluasi



Nja Sastiana, A.Ma

NIP. 199710052025212024

**Lampiran 4.** Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Perhubungan Kota Prabumulih

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <b>PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH</b><br/> <b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</b><br/>           Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022         </div> </div> |                                                       |                    |                    |       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|----------------|
| Urusan Pemerintahan : 2.15 PERHUBUNGAN<br>SKPD : 2-15.0-00.0-00.01 DINAS PERHUBUNGAN<br>Unit Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01.001 DINAS PERHUBUNGAN<br>Sub Unit Organisasi : 2-15.0-00.0-00.01.001.000 DINAS PERHUBUNGAN                                                                                                                                                                                              |                                                       |                    |                    |       |                |
| KODE REKENING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | URAIAN                                                | ANGGARAN           | REALISASI 2023     | (%)   | REALISASI 2022 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PENDAPATAN DAERAH                                     | 1.852.000.000,00   | 894.244.400,00     | 48,29 | 0,00           |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                          | 1.852.000.000,00   | 894.244.400,00     | 48,29 | 0,00           |
| 4.1.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Retribusi Daerah                                      | 1.852.000.000,00   | 894.244.400,00     | 48,29 | 0,00           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BELANJA DAERAH                                        | 7.713.900.395,00   | 6.523.155.961,00   | 84,56 | 0,00           |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BELANJA OPERASI                                       | 6.331.328.395,00   | 5.752.109.566,00   | 90,85 | 0,00           |
| 5.1.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Belanja Pegawai                                       | 4.188.110.395,00   | 3.869.872.596,00   | 92,40 | 0,00           |
| 5.1.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Belanja Barang dan Jasa                               | 2.143.218.000,00   | 1.882.236.970,00   | 87,82 | 0,00           |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BELANJA MODAL                                         | 1.382.572.000,00   | 771.045.395,00     | 55,77 | 0,00           |
| 5.2.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                     | 1.382.572.000,00   | 771.045.395,00     | 55,77 | 0,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>SURPLUS / DEFISIT</b>                              | (5.861.900.395,00) | (5.628.911.561,00) | 0     | 0,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b> | (5.861.900.395,00) | (5.628.911.561,00) | 0     | 0,00           |

## 2. Laporan Realisasai Anggaran Tahun 2024

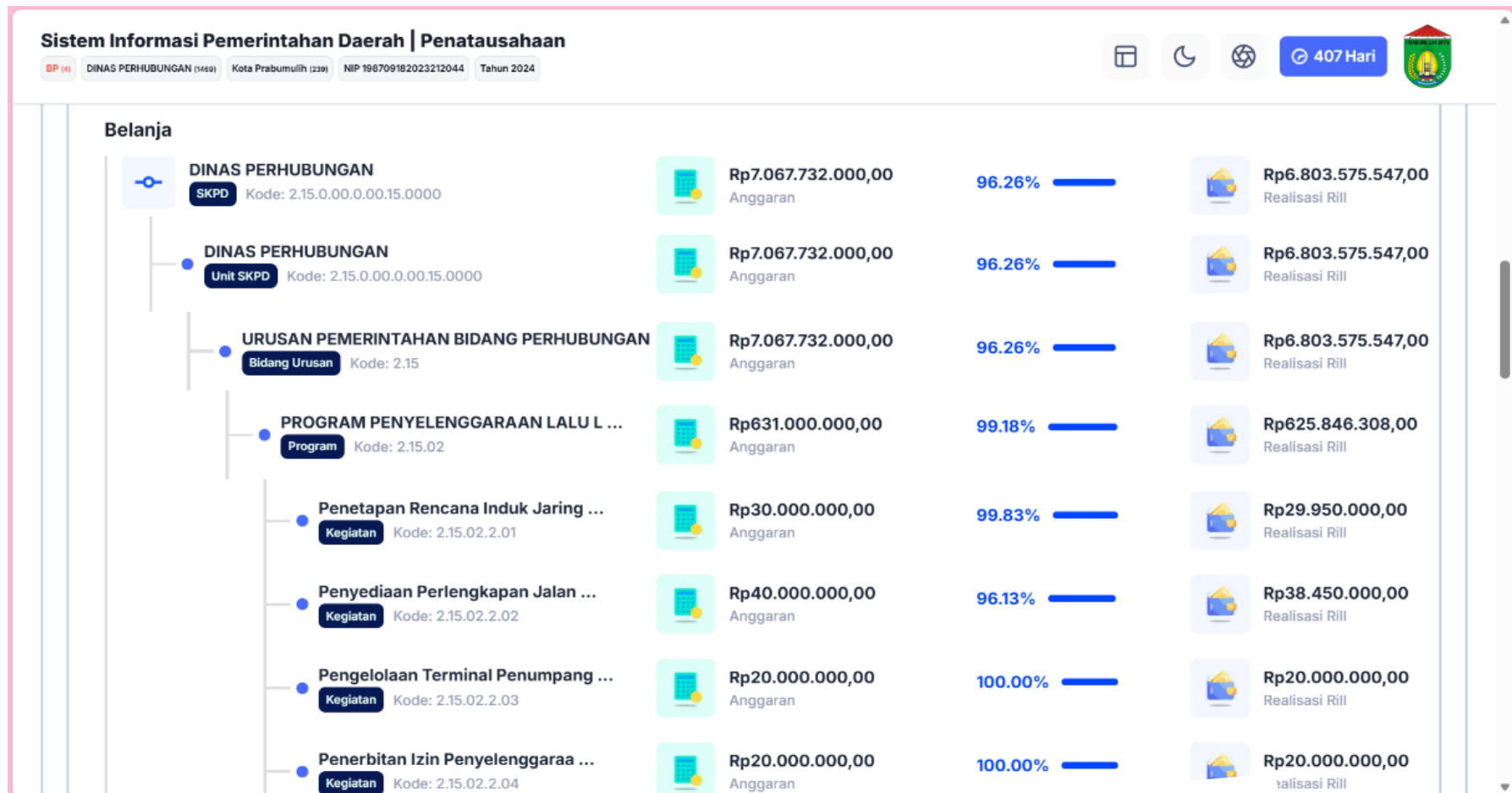


PEMERINTAHAN KOTA PRABUMULIH  
 DINAS PERHUBUNGAN  
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2024  
 01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



| Kode Rekening | URAIAN                            | ANGGARAN 2024      | REALISASI 2024     | % 2024            | REALISASI 2023 |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1             | 2                                 | 3                  | 4                  | 5 = (4 / 3) * 100 | 6              |
| 4.1           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 2.352.000.000,00   | 774.255.000,00     | 32,92             | 0,00           |
| 4.1.02        | Retribusi Daerah                  | 2.352.000.000,00   | 774.255.000,00     | 32,92             | 0,00           |
|               | JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH     | 2.352.000.000,00   | 774.255.000,00     | 32,92             | 0,00           |
|               | JUMLAH PENDAPATAN                 | 2.352.000.000,00   | 774.255.000,00     | 32,92             | 0,00           |
| 5             | BELANJA DAERAH                    | 7.067.732.000,00   | 6.803.575.547,00   | 96,26             | 0,00           |
| 5.1           | BELANJA OPERASI                   | 6.498.862.000,00   | 6.273.997.439,00   | 96,54             | 0,00           |
| 5.1.01        | Belanja Pegawai                   | 4.425.448.149,00   | 4.271.216.932,00   | 96,51             | 0,00           |
| 5.1.02        | Belanja Barang dan Jasa           | 2.073.413.851,00   | 2.002.780.507,00   | 96,59             | 0,00           |
|               | JUMLAH BELANJA OPERASI            | 6.498.862.000,00   | 6.273.997.439,00   | 96,54             | 0,00           |
| 5.2           | BELANJA MODAL                     | 568.870.000,00     | 529.578.108,00     | 93,09             | 0,00           |
| 5.2.02        | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 568.870.000,00     | 529.578.108,00     | 93,09             | 0,00           |
|               | JUMLAH BELANJA MODAL              | 568.870.000,00     | 529.578.108,00     | 93,09             | 0,00           |
|               | JUMLAH BELANJA                    | 7.067.732.000,00   | 6.803.575.547,00   | 96,26             | 0,00           |
|               |                                   | (4.715.732.000,00) | (6.029.320.547,00) | 127,86            | 0,00           |
|               | SURPLUS/DEFISIT                   |                    |                    |                   |                |

**Lampiran 5. Laporan Pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kota Prabumulih Tahun 2024**



|                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Pengujian Berkala Kendaraan Be ...</b><br/> <b>Kegiatan</b> Kode: 2.15.02.2.05         </li> </ul> |  <b>Rp99.000.000,00</b><br>Anggaran      | <b>96.99%</b>     |  <b>Rp96.023.108,00</b><br>Realisasi Rill      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Pelaksanaan Manajemen Dan Reka ...</b><br/> <b>Kegiatan</b> Kode: 2.15.02.2.06         </li> </ul> |  <b>Rp197.000.000,00</b><br>Anggaran     | <b>99.71%</b>     |  <b>Rp196.428.200,00</b><br>Realisasi Rill     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Persetujuan Hasil Analisis Dam ...</b><br/> <b>Kegiatan</b> Kode: 2.15.02.2.07         </li> </ul> |  <b>Rp30.000.000,00</b><br>Anggaran      | <b>99.98%</b>     |  <b>Rp29.995.000,00</b><br>Realisasi Rill      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Audit Dan Inspeksi Keselamatan ...</b><br/> <b>Kegiatan</b> Kode: 2.15.02.2.08         </li> </ul> |  <b>Rp20.000.000,00</b><br>Anggaran      | <b>100.00%</b>    |  <b>Rp20.000.000,00</b><br>Realisasi Rill      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Penyediaan Angkutan Umum Untuk ...</b><br/> <b>Kegiatan</b> Kode: 2.15.02.2.09         </li> </ul> |  <b>Rp155.000.000,00</b><br>Anggaran     | <b>100.00%</b>    |  <b>Rp155.000.000,00</b><br>Realisasi Rill     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Penetapan Rencana Umum Jaringa ...</b><br/> <b>Kegiatan</b> Kode: 2.15.02.2.11         </li> </ul> |  <b>Rp0,00</b><br>Anggaran               | <b>0.00%</b>      |  <b>Rp0,00</b><br>Realisasi Rill               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Penetapan Wilayah Operasi Angk ...</b><br/> <b>Kegiatan</b> Kode: 2.15.02.2.13         </li> </ul> |  <b>Rp20.000.000,00</b><br>Anggaran      | <b>100.00%</b>    |  <b>Rp20.000.000,00</b><br>Realisasi Rill      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMER ...</b><br/> <b>Program</b> Kode: 2.21.01         </li> </ul>       |  <b>Rp6.436.732.000,00</b><br>Anggaran | <b>95.98%</b>   |  <b>Rp6.177.729.239,00</b><br>Realisasi Rill |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Perencanaan, Penganggaran, Dan ...</b><br/> <b>Kegiatan</b> Kode: 2.21.01.2.01         </li> </ul> |  <b>Rp13.500.000,00</b><br>Anggaran    | <b>100.00%</b>  |  <b>Rp13.500.000,00</b><br>Realisasi Rill    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Administrasi Keuangan Perangka ...</b><br/> <b>Kegiatan</b> Kode: 2.21.01.2.02         </li> </ul> |  <b>Rp4.413.888.149,00</b><br>Anggaran | <b>96.52%</b>   |  <b>Rp4.260.136.932,00</b><br>Realisasi Rill |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Administrasi Barang Milik Daer ...</b><br/> <b>Kegiatan</b> Kode: 2.21.01.2.03         </li> </ul> |  <b>Rp34.080.000,00</b><br>Anggaran  | <b>91.20%</b>  |  <b>Rp31.080.000,00</b><br>Realisasi Rill  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Administrasi Kepegawaian Peran ...</b><br/> <b>Kegiatan</b> Kode: 2.21.01.2.05         </li> </ul> |  <b>Rp165.000.000,00</b><br>Anggaran | <b>98.46%</b>  |  <b>Rp162.464.814,00</b><br>Realisasi Rill |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Administrasi Umum Perangkat Da ...</b><br/> <b>Kegiatan</b> Kode: 2.21.01.2.06         </li> </ul> |  <b>Rp831.123.851,00</b><br>Anggaran | <b>97.96%</b>  |  <b>Rp814.151.162,00</b><br>Realisasi Rill |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Pengadaan Barang Milik Daerah ...</b><br/> <b>Kegiatan</b> Kode: 2.21.01.2.07         </li> </ul>  |  <b>Rp503.680.000,00</b><br>Anggaran | <b>94.56%</b>  |  <b>Rp476.300.000,00</b><br>Realisasi Rill |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urus ...</b><br/> <b>Kegiatan</b> Kode: 2.21.01.2.08         </li> </ul> |  <b>Rp140.460.000,00</b><br>Anggaran | <b>78.58%</b>  |  <b>Rp110.375.801,00</b><br>Realisasi Rill |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Pemeliharaan Barang Milik Daer ...</b><br/> <b>Kegiatan</b> Kode: 2.21.01.2.09         </li> </ul> |  <b>Rp335.000.000,00</b><br>Anggaran | <b>92.45%</b>  |  <b>Rp309.720.530,00</b><br>Realisasi Rill |

Sebelumnya **1** Selanjutnya

Menampilkan data ke- 1 dari 1 data **100 Data** ▾

2000

## Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian



(Tampak depan kantor Dinas Perhubungan Kota Prabumulih)



(Wawancara dengan Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Prabumulih)



(Wawancara dengan Ketua subbagian Keuangan)



(Wawancara dengan Bendahara Pengeluaran)



(Wawancara dengan staf bagian Perencanaan Dan Evaluasi)

## Lampiran 7. Riwayat Hidup

### RIWAYAT HIDUP



Rosalia Septiasari alias Ocha adalah penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 18 September 2004 di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan. Penulis merupakan putri ke-4 dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Widodo dan Ibu Rina Yuspita. Penulis pertama kali menempuh jenjang pendidikan di TK Pertiwi pada tahun 2009 sampai tahun 2010. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 28 Prabumulih sampai dengan tamat pada tahun 2016. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 03 Prabumulih dan tamat pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan ke MAN 01 Prabumulih dan tamat pada tahun 2022. Dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswi di Universitas Prabumulih, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi dan insya Allah akan lulus pada tahun 2026 ini.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan dukungan dari berbagai pihak terutama keluarga. Penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Semoga penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi yang positif bagi semua pembaca. Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Anggaran Sebagai Bentuk Pengendalian Biaya pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih”**.